

PENGERAHAN ROMUSA DI YOGYAKARTA

TAHUN 1943-1945

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan



Oleh:
Ifnu Erdiyanto
05406244020

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Pengerahan Romusa di Yogyakarta Tahun 1943-1945” ini telah disetujui oleh pembimbing untuk dipertahankan di depan dewan penguji tugas akhir skripsi program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.



Yogyakarta, 14 Mei 2012

Pembimbing I

Dr. Aman, M. Pd.

NIP. 19741015 2003 12 1 001

Pembimbing II

Zulkarnain, M. Pd.

NIP.19740809 2008 12 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pengerahan Romusa di Yogyakarta Tahun 1943-1945"
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji skripsi tanggal 14 Mei 2012
dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Aman, M. Pd.	Ketua Penguji		14 - 05 - 2012
Zulkarnain, M. Pd.	Sekretaris		14 - 05 - 2012
M Nur Rokhman, M. Pd.	Penguji Utama		14 - 05 - 2012

Yogyakarta, 14 Mei 2012

Dekan FIS

Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.

NIP. 19620321 198903 1 001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ifnu Erdiyanto

NIM : 05406244020

Prodi : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul : "Pengerahan Romusa di Yogyakarta Tahun 1943-1945"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan karya penulis. Sepanjang pengetahuan penulis, tidak terdapat karya yang ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis gunakan sebagai sumber atau acuan dengan tata tulis ilmiah yang lazim. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 14 Mei 2012

Penulis,



Ifnu Erdiyanto

NIM. 05406244020

MOTTO

- ❖ Awali dengan Bismillahi Rahmanir Rahim dan akhiri dengan Alhamdulillah Rabbilalamin.
- ❖ Kunci sukses seseorang terletak pada kesadaran untuk berusaha dengan giat dan berdoa, tidak terlepas dari dukungan orang-orang yang disayangi serta doa dari Ayah dan Ibu.
- ❖ Jangan pernah takut untuk mencoba dan gagal, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan.
- ❖ Yakinlah bahwa jalan hidupmu adalah yang terbaik untukmu, maka hadapilah dengan sikap terbaikmu.

PERSEMBAHAN



Seiring rasa syukur dan atas Ridho-Mu ya Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda (Sudiyanto) dan Ibunda (Juwariah) atas cinta dan kasih sayang, doa dan jerih payah dan bimbingannya dari awal kehidupan sampai saat ini dalam menimba ilmu dan meraih cita-cita
 - ❖ Kubingkiskan skripsi ini untuk.
- ❖ Bapak Aman dan Pak Zulkarnain, yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini sampai selesai. Tiada kata yang tidak bisa kuucapkan hanya ungkapan kata terimakasih untuk kedua bapak dosen.
- ❖ Saudara-saudaraku dan semua keluargaku yang telah banyak berkorban, baik berupa mental maupun moril dalam menyelesaikan skripsiku.
- ❖ Kekasihku Heni Nastiti yang selalu menemaniku.
- ❖ Pak Pur yang selalu menemani selama di UNY dan memberi dorongan untuk menyelesaikan study ini.

PENGERAHAN ROMUSA DI YOGYAKARTA TAHUN 1943-1945

Oleh:
Ifnu Erdiyanto

ABSTRAK

Pengerahan romusa di Yogyakarta mempunyai peranan yang sangat penting bagi rakyat. Tujuan dari penulisan ini adalah memaparkan mengenai latar belakang di laksanakan romusa dan faktor yang mempengaruhinya, usaha-usaha pemerintah pendudukan Jepang dalam pelaksanaan romusa di Yogyakarta dan peranan yang dilakukan pihak keraton dalam pelaksanaan pengarahannya, serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan romusa terhadap masyarakat Yogyakarta.

Metode dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian sejarah kritis yang terdiri dari empat langkah. Pertama adalah heuristik, yaitu mengumpulkan sumber-sumber baik mengkaji buku-buku yang relevan, koran, serta wawancara dengan beberapa pihak. Langkah kedua adalah kritik sumber dimana penulis meneliti sumber yang diperoleh baik ekstern maupun intern sehingga diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan kritik sumber, tahap ketiga yaitu menafsirkan secara analisis atau sintesis dari bahan yang telah diperoleh sebagai tahap interpretasi. Tahap keempat adalah historiografi penyajian dimana pada penulis menyajikan hasil penafsiran tersebut secara kronologis dan deskriptif analitis dalam bentuk karya sejarah.

Berdasarkan masalah yang dikaji dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Jepang ketika menduduki Yogyakarta berusaha menerapkan kebijakan, yaitu dengan cara memobilisasi rakyat Yogyakarta untuk pembentukan romusa untuk kepentingan Jepang. Dalam perekrutan romusa Hamengku Buwono IX mengusulkan kepada Jepang untuk memberikan dana bantuan pembangunan saluran air karena Yogyakarta kondisi beberapa daerahnya sangat kering di musim kemarau yang menyebabkan menurunnya produksi pangan, tetapi pada musim hujan banyak daerah yang tergenang air dan. sehingga banyak rakyat Yogyakarta yang bekerja pada proyek tersebut dan tidak menjadi romusa yang dikirim untuk daerah lain atau luar negeri. romusa membawa dampak sosial dan ekonomi yang serius bagi rakyat terutama di pedesaan, seperti kekurangan tenaga kerja dalam bidang pertanian yang mengakibatkan menurunnya produksi pangan, kekurangan gizi, menurunnya angka kelahiran.

Kata Kunci: Jepang, Romusa, Keraton, Hamengku Buwono IX.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-Nya, serta limpahan kekuatan dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi tanpa ada halangan yang berarti sampai tersusunnya laporan ini. Laporan ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan teknik yang merupakan tugas akhir wajib lulus bagi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, M. A, selaku rektor UNY yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag selaku Dekan FIS yang telah memberikan berbagai kemudahan dalam penelitian ini.
3. Bapak M. Nur Rokhman, M. Pd selaku kajar Pendidikan Sejarah yang senantiasa memotivasi, memberikan arahan.
4. Bapak Supardi, M. Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah maupun dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Aman, M. Pd selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah memberikan arahan dan pengarahan selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak Zulkarnain, M. Pd selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah memberikan arahan dan pengarahan selama penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah mencurahkan Ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Keluargaku, yang telah memberikan banyak dukungan, nasehat dan do'a demi kelancaran skripsi ini.
9. Teman-teman di Pendidikan Sejarah NR angkatan 2008 yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini, tidak akan terlupakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih kurang dari sempurna sehingga perlu pembenahan. Oleh karena itu kritik, saran dan himbauan yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan mendatang. Penulis juga memohon maaf jika dalam penulisan ini terdapat suatu kesalahan maupun kekeliruan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja kepada semua pihak yang terkait, maupun pihak institusi UNY. Penulis berharap semoga laporan penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 14 Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Peneliti.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Historiografi yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian dan Pendekatan Peneliti	12
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PENDUDUKAN JEPANG DI YOGYAKARTA	
A. Latar Belakang Ivasi Jepang.....	22

B. Runtuhnya Kekuasaan Hindia Belanda	26
C. Pendudukan Jepang di Yogyakarta	29

**BAB III MOBILISASI ROMUSA DAN DAMPAK TERHADAP RAKYAT
YOGYAKARTA**

A. Usaha-usaha Jepang Untuk Keberhasilan Mobilisasi Massa	34
B. Sistem Perekrutan Romusa	41
C. Kondisi Kerja Romusa	47
1. Kondisi Kerja Romusa di Dalam Wilayah Yogyakarta.....	48
2. Kondisi Kerja Romusa Dikirim di Luar Yogyakarta.....	50
D. Kondisi Upah Romusa.....	54

**BAB IV KEBIJAKAN HAMENGGU BUWONO IX PENGARUH
TERHADAP MOBILISASI ROMUSA DI YOGYAKARTA**

A. Pengambilan Kewenangan Melalui Pergeseran Peranan Papatih Dalem	57
B. Melindungi Petani	59
C. Memalsukan Angka Statistik Untuk Penguasa Jepang	60
D. Meminta Bantuan Dana Untuk Pembangunan Saluran Irigasi.....	61
E. Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Romusa	62
F. Repatriasi Romusa.....	65
G. Pengaruh Kebijakan Hamengku Buwono IX Terhadap Mobilisasi Romusa di Yogyakarta	68
H. Dampak Pengerahan Romusa Terhadap Rakyat Yogyakarta.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 75

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN..... 82

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap bangsa memiliki dan menulis sejarahnya sendiri, begitu juga bangsa Indonesia yang sejarahnya syarat dengan perjuangan dan perlawanan menentang penjajah. Bagi rakyat Indonesia khususnya rakyat Jawa romusa merupakan istilah yang akan mengingatkan kita pada pengalaman pahit selama masa pendudukan Jepang. Jutaan orang Jawa yang pada umumnya adalah petani biasa, diluar kehendak mereka dimobilisasikan sebagai buruh kuli bagi pekerja kasar di bawah kekuasaan militer Jepang. Mereka diperintah supaya bekerja pada proyek-proyek pembangunan dan pabrik, bahkan tidak sedikit yang dikirim ke luar negeri. Karena kondisi kerja yang terlalu keras dan kondisi kesehatan yang buruk, banyak diantara mereka yang meninggal dunia. Sedangkan yang lain masih beruntung hidup walaupun menderita karena penyakit, kekurangan gizi, dan ada luka-luka. Keluarga mereka yang ditinggalkan juga menderita akibat kemiskinan karena tanah pertanian mereka sering dibiarkan tidak ditanami karena langkanya tenaga kerja yang menggarap. Kondisi ini akhirnya menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian di seluruh Jawa.¹

Masyarakat petani Yogyakarta dikerahkan sebagai romusa untuk bekerja di dalam wilayah Yogyakarta atau dikirim ke daerah lain dan ke luar negeri. Romusa di Yogyakarta ditetapkan dengan bantuan panitia pengerahan romusa yang melibatkan

¹ Aiko Kurasawa. *Mobilisasi dan Kontrol studi tentang perubahan sosial di pedesaan jawa 1942-1945*, Jakarta: Gramedia Widayasarana Indonesia, 1989. hlm. 123.

tonari gumi (rukun tetangga) dan *asa jookai* (rapat berkala kampung) yaitu mengambil anggota *tonari gumi* yang produktif untuk di jadikan romusa.²

Perkembangan situasi politik perang mulai tahun 1943 berubah dari sikap ofensif Jepang beralih ke defensif. Pukulan-pukulan sekutu di daerah pasifik mulai dirasakan terutama sejak pertempuran Laut Karang pada bulan Mei 1942 dan Guadalcanal pada bulan Agustus 1942. Jepang menyadari bahwa untuk dapat mempertahankan pendudukannya yang luas memerlukan dukungan dari penduduk masing-masing daerah pendudukanya. Pada bulan September 1943 pemerintah dan militer Jepang mulai memusatkan pertahanan bagi wilayah yang disebut sebagai “Linkungan yang Mutlak Harus di Pertahankan” (*Zettai Kokubooken*) yang meliputi seluruh Asia Tenggara dan Papua Nugini.³ Pada saat itulah muncul kebutuhan besar akan berbagai pekerjaan pembangunan pertahanan.

Akibat situasi tersebut, perekrutan romusa di Jawa termasuk Yogyakarta meningkat secara luar biasa dan dampaknya atas rakyat menjadi serius. Pada tahap awal tenaga romusa oleh perusahaan swasta di pekerjakan untuk pekerjaan seperti di pabrik, mereka diperlakukan seperti buruh tetap. Akan tetapi setelah mereka mulai dipekerjakan secara langsung oleh penguasa militer Jepang untuk pembangunan pertahanan, mereka diperlakukan tidak lebih sebagai kuli paksaan. Hal ini berarti

² Di seluruh Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman dibentuk 965 *asa jookat*, yang meliputi 25.615 *tonari gumi*. Dalam P.J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1972-1974*. Yogyakarta Kanisius.1994. hlm. 122.

³ Aiko Karasawa, *op,cit.* hlm., 124.

bahwa tenaga kerja diperlukan tidak hanya untuk eksploitasi ekonomi, tetapi juga untuk proyek-proyek yang langsung berkaitan dengan kelangsungan perang.⁴

Untuk mengurangi ketakutan rakyat menjadi romusa, maka sejak tahun 1943 Jepang melancarkan propaganda membuat kuli-kuli ini menjadi pahlawan. Kampanye inilah yang menggunakan nama "prajurit ekonomi" bagi romusa yang jutaan jumlahnya itu. Para pahlawan ini digambarkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan kewajiban suci untuk militer Jepang. Mereka tidak boleh lagi disebut kuli tapi romusa atau prajurit dan sumbangan mereka terhadap usaha peperangan sangat dihargai.⁵

Keberhasilan Jepang dalam propaganda tersebut tidak lepas dari keberhasilannya dalam melibatkan para pemimpin nasional dan pemimpin daerah atau kepala daerah yang terdiri dari pegawai tinggi dan menengah yang bekerja selama satu minggu untuk usaha mempengaruhi rakyat ikut dalam romusa secara suka rela. Para pekerja dipimpin oleh Soekarno itu bekerja dalam apa yang disebut "pekan perjuangan mati-matian".⁶ Tentang upah romusa sebenarnya telah ditetapkan dalam asas-asas untuk mengatur pemberian upah, namun sangat diragukan bahwa peraturan dan ketetapan semacam itu benar-benar di jalankan. Dalam romusa upah yang rendah bukan persoalan yang serius, tragedy besar romusa adalah cara-cara yang tidak manusiawi yang dilakukan terhadap mereka.⁷

⁴ *Ibid.*, hlm. 124.

⁵ O.D.P. Sihombing. *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*. Jakarta: Sinar Jaya, 1962, hlm. 145.

⁶ *Djawa Baroe*, 1 Oktober 2601(1994), hlm. 16-17.

⁷ O.D.P. Sihombing, *op.cit.*, hlm.147.

Pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun membawa perubahan sosial, ekonomi, dan politik bagi rakyat Jawa termasuk rakyat Yogyakarta. Pelaksanaan romusa membawa akibat sosial yang sebenarnya dapat membantu memecahkan masalah pengangguran ketika perkebunan-perkebunan ekspor di tutup, hanya dalam pelaksanaannya para romusa diperlakukan tidak manusiawi. Pengaruh buruk dari sistem romusa itu ditambah lagi dengan pelaksanaan setempat yang melalui pengecualian-kecualian, baik dengan menyogok pejabat pelaksana maupun dengan membayar kawan sekampung yang dilanda kemiskinan untuk menggantikannya. Dengan jalan ini golongan-golongan masyarakat yang lebih kuat dan makmur seperti pedagang-pedagang kaya, pejabat-pejabat, orang Tionghua mampu mengambil keuntungan lebih banyak dan nasib mereka lebih baik sementara penderitaan penduduk miskin menjadi lebih berat.⁸

Akibat dalam bidang politik, hampir setiap golongan pegawai bangsa Indonesia dipaksa Jepang untuk menjalankan beberapa tanggung jawab dalam pelaksanaan romusa. Pelaksanaan tersebut adalah dengan menyelenggarakan pengerahan di tingkat desa, melakukan propaganda di tingkat lebih tinggi atau dengan tidak berbuat sesuatu untuk menghalanginya. Hal ini merupakan kemrosotan besar harga diri dan kewibawaan golongan ini selama masa pendudukan Jepang.⁹

Akibat ekonomi yang ditimbulkan dari romusa adalah berkurangnya tenaga produktif di desa-desa. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya produksi sektor

⁸ Ben Anderson, *Revolusi Pemoeda*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 32-33.

⁹ *Ibid*, hlm.33.

pertanian dan berkurangnya produksi bahan makanan sehingga menambah beban penderitaan rakyat Jawa dan rakyat Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penulisan ini adalah berikut ini.

1. Latar belakang di laksanakan romusa dan faktor yang mempengaruhinya?
2. Bagaimana langkah pemerintah pendudukan Jepang di Yogyakarta dalam pelaksanaan romusa di Yogyakarta?
3. Peranan apa yang dilakukan pihak keraton dalam pelaksanaan pengarahannya romusa di Yogyakarta?
4. Apa dampak sosial, politik dan ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan romusa terhadap masyarakat Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Mengembangkan sikap berfikir kritis, analitis, objektif terhadap sumber sejarah dan dalam menganalisis peristiwa masa lampau.
- b. Sebagai sarana yang efektif dalam mengaplikasi metode penulisan sejarah yang sudah didapat pada waktu kuliah.
- c. Menambah wawasan dalam bidang sejarah, khususnya adalah tentang penelitian sejarah.

2. Tujuan Khusus

- a. Latar belakang di laksanakan romusa dan faktor yang mempengaruhinya.

- b. Bagaimana langkah pemerintah pendudukan Jepang dalam pelaksanaan romusa di Yogyakarta.
- c. Peranan apa yang dilakukan pihak keraton dalam pelaksanaan pengarahannya romusa di Yogyakarta.
- d. Apa dampak sosial, politik dan ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan romusa terhadap masyarakat Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Penelitian ini merupakan tugas akhir penulisan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
 - b. Penulisan ini dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu peristiwa sejarah.
 - c. Menambah pengetahuan penulis tentang romusa di Yogyakarta tahun 1943-1945.
2. Bagi pembaca
 - a. Menambah wawasan atau pengetahuan pembaca mengenai sejarah romusa di Yogyakarta.
 - b. Memberi gambaran bagi pembaca mengenai sejarah romusa di Yogyakarta.
 - c. Hasil penulisan ini diharapkan bisa menjadi acuan tentang penulisan berikutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berarti suatu kegiatan bagi penulis untuk memperoleh sumber-sumber yang relevan dengan judul penulisan. Kajian pustaka yang relevan merupakan suatu tahapan penting dan sangat bermanfaat dalam penulisan sebuah karya sejarah. Penggunaan kajian pustaka dalam sejarah dikaitkan dengan tema peristiwa sejarah yang akan dikaji. Pada bab ini akan dipaparkan beberapa sumber utama dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulisan skripsi tentunya tidak lepas dari kajian pustaka yang didasarkan pada beberapa sumber informasi dari disiplin ilmu sosial. Terutama disiplin ilmu sejarah, sosiologi, dan antropologi. Karena topik pembahasan sendiri lebih menyangkut kehidupan romusa. Maka berdasarkan sumber literatur ini, pada akhirnya penulisan dapat menjadikannya sebagai landasan bagi kerangka penyusunan skripsi yang berjudul "Masa Pendudukan Jepang dan Pembentukan Romusa di Yogyakarta Tahun 1943-1945".

Berdasarkan judul tersebut, topik bahasan yang pertama adalah mengenai Pendudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana keadaan sosial masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Namun pembahasan mengenai keadaan masyarakat selama pendudukan Jepang di Indonesia, hanya dijelaskan secara umum. Karena lebih khususnya adalah pembahasan mengenai "Romusa di Yogyakarta".

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah bagian selatan. Hampir seluruh wilayah dari provinsi di DIY berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah, kecuali di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan

Gunung api Merapi, satuan fisiografi pegunungan selatan atau Pegunungan seribu, satuan fisiografi pegunungan Kulonprogo, dan satuan fisiografi Dataran Rendah. Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan sarana dan prasarana wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antar wilayah yang timpang. Secara astronomi Yogyakarta terletak pada $7^{\circ}30'$ - $8^{\circ}15'$ Lintang Selatan (LS) dan $110^{\circ}00'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah $3.185,80 \text{ km}^2$, yang secara administratif dibagi dalam lima Daerah Tingkat II (Kabupaten/kota) yaitu: Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kotamadya Yogyakarta yang sekaligus menjadi Ibukota Provinsi DIY. Sebelum kemerdekaan bentuk pemerintahan daerah Yogyakarta adalah "kerajaan". Daerah ini terbagi menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman yang masing-masing diperintah oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII.¹⁰

Menurut Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Gramedia Widayarsana Indonesia, 1989, digunakan sebagai referensi, karena menjelaskan kondisi rakyat Indonesia khususnya rakyat Jawa selama pendudukan Jepang, politik dan adanya kerja paksa atau disebut romusa oleh pemerintah Jepang. Pengalaman pahit selama masa pendudukan Jepang. Jutaan orang Jawa yang pada umumnya adalah petani biasa, diluar kehendak mereka dimobilisasikan sebagai buruh kuli bagi pekerja kasar (romusa) di bawah kekuasaan militer Jepang. Mereka diperintah supaya bekerja pada

¹⁰ Sutrisno Kutoyo (ed.). (1976). *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian Kebudayaan Daerah..., hlm.19.

proyek-proyek pembangunan dan pabrik, bahkan tidak sedikit yang dikirim ke luar negeri. Karena kondisi kerja yang terlalu keras dan kondisi kesehatan yang buruk, banyak diantara mereka yang meninggal dunia. Sedangkankan yang lain masih beruntung hidup walaupun menderita karena penyakit, kekurangan gizi, dan ada luka-luka. Keluarga mereka yang ditinggalkan juga menderita akibat kemiskinan karena tanah pertanian mereka sering dibiarkan tidak ditanami karena langkanya tenaga kerja yang menggarap. Kondisi ini akhirnya menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian di seluruh Jawa.¹¹

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan buku penunjang kedua adalah karangan Soegianto Padmo, yang berjudul *Politik Penguasa dan Siasat Pemoeda Nasiolisme dan Pendudukan Jepang di Indonesia*. Buku ini menceritakan zaman penjajahan Jepang di Indonesia, serta masa system kerja paksa romusa di Indonesia. Sebenarnya buku-buku yang digunakan banyak, tetapi yang menjadi permasalahan adalah sulit untuk menemukan buku-buku tersebut, sebab sudah tidak diterbitkan lagi.¹²

Buku selanjutnya menggunakan karangannya Sagimun, dengan judul *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*. Buku digunakan sebagai kajian pustaka sebab sangat membantu dalam penulisan. Buku ini mendeskripsikan perlawanan rakyat Indonesesia baik di daerah satu maupun yang lain. Munculnya

¹¹ Kurasawa Aiko, *Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Gramedia Widayasarana Indonesia, 1989.

¹² Soegianto Padmo, *Politik Penguasa dan Siasat Pemoeda Nasiolisme dan Pendudukan Jepang di Indonesia*, Yogyakarta: kanisius dan Lembaga Realino, 1994.

perlawanan diakibatkan oleh kerja romusa dan penderitaan rakyat akibat penjajahan jepang.¹³

F. Historiografi yang Relevan

Secara harfiah, "Historiografi" berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau.¹⁴ Sedangkan secara terminologi historiografi berarti representasi tentang masa lalu dalam bentuk karya ilmiah. Dengan kata lain historiografi adalah usaha untuk mensintesis data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam buku atau artikel maupun perkuliahan sejarah. Historiografi juga berarti sebagai usahapengkajian secara kritis terhadap buku-buku sejarah yang telah ditulis, baik bersifat tradisional maupun modern.¹⁵

Historiografi adalah sebuah rekonstruksi sejarah melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman peninggalan masa lampau.¹⁶ Menurut Ritter, historiografi adalah *the writing of history* (penulisan sejarah).¹⁷ Penyajian suatu rekonstruksi peristiwa masa lampau diperlukan sebagai modal dasar terciptanya karya tulis sehingga hasil rangkaian kerja penulis sejarah dalam bentuk

¹³ Sagimun MD., *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*, Jakarta: Idayu Press, 1982, hlm. 32.

¹⁴ Heliuss Samsudin dan Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Depdikbud Dirjen Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Pendidik, 1996, hlm. 16

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁶ Louis Gotschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*. A.b. nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1969, hlm. 94.

¹⁷ Harry Ritter, *Dictionary of Concepts in History*. Connecticut: Greenwood Press, 1986, hlm. 188.

tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Historiografi merupakan puncak dalam rangkaian kerja ilmiah para sejarawan dengan metode sejarah. Dikatakan demikian karena pada historiografi inilah akan terlihat baik buruknya hasil kerja sejarawan.

Historiografi yang relevan merupakan hal pokok di antara tugas-tugas lain yang harus dikerjakan sebelum melakukan penulisan sejarah. Maksud dari historiografi yang relevan dalam hal ini adalah suatu proses mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh sejarawan. Selanjutnya ditetapkan posisi penelitian ini terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Penulisan ini juga mengulas buku-buku yang berhubungan dengan topik yang dikaji. Dari sekian banyaknya sumber yang ditemukan, buku-buku yang paling dekat dengan topik penelitian antara lain sebagai berikut.

Buku pertama yang digunakan penulis adalah karya De Jong, *Pendudukan Jepang di Indonesia Indonesia: Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintah Hindia Belanda*. Buku ini menjadi referensi penting untuk menjelaskan kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kondisi masyarakat Indonesia sudah cukup tertekan sejak pemerintahan Belanda, maka dengan masuknya Jepang ke Indonesia masyarakat menaruh harapan kepada Jepang. Awal kedatangan Jepang di Indonesia adalah dengan mengaku sebagai saudara tua. Dalam waktu singkat sifat Jepang berubah total mereka memperkerjakan para penduduk Indonesia untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan dan pabrik tanpa ada waktu istirahat, pada waktu itu pekerja tersebut disebut sebagai romusa atau buruh kasar.

Buku kedua yang digunakan penulis adalah karya Marwati Djonet dan Nugroho Notokusanto yang diterbitkan pada tahun 1993 berjudul *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Umumnya memiliki penjelasan yang sama dengan De Jong dalam buku *Pendudukan Jepang di Indonesia*. Isi buku ini dimulai dari pembentukan pemerintahan sementara, sikap dari tokoh-tokoh yang berjuang baik itu secara kooperatif ataupun yang non kooperatif dan organisasi-organisasi yang ada pada masa pergerakan Nasional Indonesia. Beberapa pemuda juga dikerahkan pada organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Kemudian pengerahan romusa ke berbagai tempat di Indonesia.

Selain buku, penulis juga menggunakan skripsi sebagai bahan historiografi yang relevan. Skripsi yang berjudul *Eksplotasi Tenaga Kerja di Pertambangan Mangan Kliripan (Kulon Progo) 1912-1950*, yang ditulis oleh Menik Bawantari, Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra UGM. Skripsi ini membahas tentang para pekerja di jaman kedudukan Belanda dan pada kedudukan Jepang masa itu. Perekrutan massal penduduk Kulon Progo di jadikan romusa untuk bekerja pertambangan Kriripan tersebut.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Sejarah sebagai ilmu adalah sebuah susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi pada manusia dimasa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas-asas prosedur dan metode serta

teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah.¹⁸ Sejarah memiliki metode sendiri dalam mengungkapkan peristiwa sejarah masa lampau agar menghasilkan karya sejarah yang kritis, ilmiah dan objektif.¹⁹ Tujuan seorang sejarawan adalah memperoleh pengetahuan tentang masa lampau kemudian menyajikannya. Metode penulisan dalam tulisan ini adalah metode *historis* yaitu menyelidiki yang mengklasifikasikan metode pemecahan ilmiah dari perspektif historis suatu masalah.

Penulisan sejarah memiliki metode tersendiri. Merekonstruksi suatu peristiwa masa lampau, seseorang sejarawan harus berdasarkan dari pada jejak-jejak sejarah yang bersandar pada fakta. Kebenaran sejarah terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber-sumber sejarah secara sukarela. Meneliti berarti sebagai penyelidikan yang seksama terhadap suatu objek untuk menemukan suatu fakta-fakta yang menghasilkan suatu produk baru, pemecahan suatu masalah, mendukung atau menolak suatu teori.²⁰ Penulisan sejarah terbagi atas empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penyajian.

a. Heuristik

Heuristik adalah mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah.²¹ Sumber sejarah disebut juga sebagai data sejarah, dalam bahasa latin disebut *datum* (tunggal) dan *data* (jamak). Sumber yang harus dikumpulkan

¹⁸ Helius Sjamsuddin dan Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta; Depdikbud, 1996, hlm.15.

¹⁹ Dadung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999, hlm.43-44.

²⁰ Tengku Ibrahim Alfian, *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: MSI, 1992, hlm. 1.

²¹ Helius Sjamsuddin dan Ismaun, *op. cit.*, hlm, 19.

haruslah sesuai dengan jenis yang dikaji. Menurut bahannya, sumber dibagi menjadi dua katagori, yaitu sumber tertulis (*dokumen*) dan sumber tak taktertulis (*artifact*).²²

Maka dalam kaitannya dengan penulisan sejarah, Heuristik merupakan suatu tehnik dalam memperoleh jejak atau data sejarah. Sumber penelitian sejarah merupakan merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Dengan adanya sumber sejarah maka dapat ditarik suatu fakta sejarah yang akan menjadi dasar usaha dalam menghidupkan masa lampau.²³ Menurut Helius Sjamsudin dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lampau.²⁴ Sejarah menurut bahannya dibedakan menjadi dua.

1) Sumber Primer

Menurut Louis Gottschalk sumber primer merupakan kesaksian dari seseorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan panca indera lain atau juga dengan alat mekanis yang selanjutnya disebut sebagai saksi pandangan mata.²⁵ Sedangkan menurut Helius Sjamsudin sumber primer dianggap sebagai sumber asli (Orisinil) dan sezaman dengan peristiwa yang terjadi. Skripsi ini penulis menggunakan sumber primer yaitu dengan datang

²² Louis Gottschalk, *loc.cit.*,

²³ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982, hlm. 83.

²⁴ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Depdikbud, 1994, hlm. 73.

²⁵ Luis Gottschalk, *op.cit.*, hlm.35.

langsung ke objek penelitian yaitu tempat tinggal seorang mantan romusa di Yogyakarta.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi mata, yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dimaksud.²⁶ Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari orang kedua yang memperoleh berita dari sumber lain yang sezaman dengan peristiwa tersebut. Adapun sumber sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

De Jong.,1987 *Pendudukan Jepang di Indonesia Indonesia: Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintah Hindia Belanda*, Jakarta: Kesaint Blanck.

Thomson, C. G.,1980 *Romusa Kisah Seorang Tawanan Jepang*, Jakarta: Sinar Harapan.

Kurasawa Aiko.,1989 *Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Gramedia Widayarsana Indonesia.

Masyuri, ed. Al.,1977 *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sagimun MD.,1982 *Perlwanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*, Jakarta: Idayu Press.

Marwati Djonet dan Nugroho Notosusanto.,1993 *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balia Pustaka.

b. Kritik Sumber

Kritik sumber atau verifikasi sumber yaitu menganalisis secara kritis sumber-sumber sejarah.²⁷ Disebut juga kegiatan meneliti sumber untuk menentukan validitas dan reabilitas (kebenaran atau keaslian sumber) yang

²⁶ Luis Gottschalk, *ibid*.

²⁷ Helius Sjamsuddin dan Ismaun, *op. cit.*, hlm, 20.

telah didapatkan, yaitu kegiatan meneliti sumber-sumber sejarah baik secara eksteren maupun interen. Kritik eksteren berhubungan dengan persoalan dengan otensitas sumber atau mencoba mencari jawaban terhadap keaslian dan keutuhan sumber yang dipakai. Sedangkan kritik interen berkaitan dengan kredibilitas sumber, yaitu sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak kebenarannya.²⁸ Dalam tahap ini penulis menyeleksi terlebih dahulu sumber-sumber yang telah didapatkan agar penulisannya dapat bertanggungjawab secara alamiah.

c. Interpretasi

Interpretasi yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta sejarah yang diperoleh setelah diterapkan kritik eksteren dan interen.²⁹ Tahap ini terbagi menjadi dua langkah yaitu: pertama analisis yang berarti menguraikan dan yang kedua adalah sintesis yang berarti menyatukan. Tahap interpretasi ini penulis akan berusaha menguraikan sumber, dimana sumber terkadang mengandung kemungkinan-kemungkinan, kemudian data yang terkumpul dan disatukan menjadi sebuah fakta yang akurat.³⁰

d. Penyajian

Penyajian berupa penyampaian sintesis yang diperoleh melalui penelitian. Tahap ini penulis menerangkan semua data yang telah terseleksi dan

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 30.

²⁹ Helius Sjamsuddin dan Ismaun, *op. cit.*, hlm.9.

³⁰ Fakta Sejarah (Historical Fact) Menurut Riter adalah: A Claim to Cnowled Estanbilised by Historical inquiry. Lihat Riter Hary, 1986, hlm. 153.

telah diinterpretasikan berdasarkan prinsip kronologis. Penyajian merupakan tahap terakhir bagi penulis semua fakta menjadi sebuah tulisan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah menjadi masa lampau.³¹ Penulisan sejarah memerlukan pendekatan secara multidimensional untuk memperkuat makna peristiwa masa lampau guna mendekati suatu peristiwa dalam berbagai aspek kehidupan. Suatu peristiwa tidak terjadi karena satu sebab melainkan karena berbagai sebab. Berbagai sebab ini akan saling mempengaruhi, sehingga dengan pendekatan yang multidimensional diharapkan mampu mengkaji secara komperhensif. Pendekatan multidimensional ini, yaitu daya penerangannya untuk mengatasi pendekatan yang berakar pada filsafat tertentu dan menimbulkan determinasi.³²

Berdasarkan pertimbangan perlunya metode pendekatan dalam penelitian dan penulisan sejarah, maka penulisan sekripsi ini menggunakan beberapa pendekatan sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan sekripsi ini adalah pendekatan histories, pendekatan politik, pendekatan sosiologi, pendekatan ekonomi, pendekatan geografi dan pendekatan psikologis.

³¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Penelitian Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 19.

³² Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982, hlm. 71.

Menurut Roeslan Abdulgani pendekatan histories dimaksudkan untuk meneliti dan menyelidiki secara sistematis perkembangan masyarakat secara kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan penyelidikan itu untuk akhirnya dijadikan sebagai perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta proses masa depan.³³ Pendekatan histories dalam skripsi ini ialah adanya kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dan menagadakan kerja paksa atau disebut juga romusa di berbagai daerah seperti Yogyakarta.

Pendekatan politik menurut Deliar Noer adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.³⁴ Menurut Sartono Kartodirdjo, pendekatan politis adalah pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan sebagainya.³⁵ Pendekatan politik dalam tulisan ini digunakan untuk mengetahui situasi politik Yogyakarta sebelum dan sesudah adanya romusa.

Pendekatan sosiologis menurut Sartono Kartodirdjo adalah suatu pendekatan yang menepohong segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji, misalnya golongan mana yang berperan serta nilai-nilainya, hubungannya dengan golongan-golongan konflik berdasarkan kepentingan-kepentingan ideologis dan

³³ Roeslan Abdulgani. *Penggunaan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Prapanca, 1989, hlm.10.

³⁴ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik I*. Medan: Dwipa, 1995, hlm.6.

³⁵ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm.4.

lain sebagainya.³⁶ Sedangkan, menurut Soerjono Soekanto, pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang sangat mementingkan peranan sosiologis untuk menjelaskan perilaku manusia.³⁷ Pendekatan sosiologis ini dimaksudkan untuk menepohong segi-segi sosial yang diteliti, misalnya saja golongan mana yang berperan serta nilai-nilai dan hubungannya dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan idiologi dan sebagainya. Pendekatan sosiologis ini dapat digunakan untuk mengetahui interaksi para masyarakat yang ikut romusa di masa melakukan kerja paksa atau romusa.

Pendekatan ekonomi, suatu pendekatan yang mengaitkan pandangan tentang ekonomi yang dibedakan menjadi dua hal, yaitu membedakan tulisan dari kejadian dan keadaan ekonomi serta menggambarkan ekonomi masyarakat dalam perkembangannya.³⁸ Menurut Sidi Gazalba, pendekatan ekonomi merupakan penjabaran dari konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasinya yang dapat mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam kehidupan ekonomi, sehingga dapat dipastikan hukum dan kaidahnya.³⁹ Pendekatan ekonomi dalam tulisan ini digunakan untuk mengetahui perekonomian masyarakat Yogyakarta khususnya pada masa adanya romusa.

³⁶ *Ibid.*, hlm.4.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Utama, 1990, hlm.464.

³⁸ Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*. Jakarta: Fransko, 1957, hlm.14.

³⁹ Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhatara karya Aksara, 1996, hlm.33.

Pendekatan geografi dapat dipakai untuk membantu penelitian sejarah. Menurut Lombard bahwa tak satupun ancangan sejarah akan mencapai tujuannya tanpa memperhatikan faktor geografis. Dalam skripsi ini pendekatan geografi digunakan untuk mengetahui letak, topografi, dan kondisi geografis kota Yogyakarta.

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang akan menghasilkan *micro history* sampai pada tingkat kelakuan individu dan kolektif dalam komunitas kelompok. Kaidah-kaidah kolektif dapat membantu menginterpretasikan maksud kelakuan pelaku. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis atau kejiwaan para romusa di Yogyakarta.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara keseluruhan isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara garis besar mengenai semua pokok bahasan yang akan dibahas dengan judul “Pengerahan Romusa di Yogyakarta 1943-1945”. Ini, maka penulis akan membagi kedalam lima bab, dengan garis besar sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi tentang sistematika penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian dan pendekatan penelitian sistematika pembahasan.

Pada bab kedua menguraikan latar belakang invasi Jepang, yang isinya Jepang ingin memperluas jajahannya, keruntuhan Hindia Belanda dan masuknya

Jepang di Indonesia, pendudukan Jepang di Yogyakarta dan pembentukan birokrasi pemerintahan pendudukan.

Pada bab ketiga meliputi upaya-upaya demi keberhasilan mobilisasi yaitu melalui media propaganda dan pembentukan organisasi sebagai sarana mobilisasi massa, system perekrutan romusa, kondisi kerja romusa baik di dalam maupun di luar Yogyakarta atau luar negeri, kondisi upah romusa, usaha untuk meningkatkan kesejahteraan romusa bagi rakyat Yogyakarta.

Pada bab keempat berisi tentang kebijaksanaan Sultan Hamengk Buwono IX dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pengarahannya romusa di Yogyakarta.

Pada bab terakhir kelima berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta isi dari semua pokok pembahasan penulisan skripsi yang berjudul “ Pengerahan Romusa di Yogyakarta Tahun 1943-1945”.

BAB II

PENDUDUKAN JEPANG DI YOGYAKARTA

A. Latar Belakang Invasi Jepang

Pada permulaan Perang Dunia II terdapat laporan-laporan tentang persiapan Jepang untuk melakukan penyerbuan ke selatan. Hal ini menimbulkan ketakutan serius bagi Belanda dan sekutu-sekutunya. Isyarat akan dimulai penyerbuan oleh pihak Jepang tersebut dapat diketahui lewat pernyataan materi luar negeri Jepang pada bulan Mei 1940 yang menyatakan pada duta besar Italia, Inggris, dan Jerman di Tokyo bahwa kejadian-kejadian di Eropa memperbesar kekhawatiran Jepang mengenai jajahan Belanda.¹ Dari isyarat tersebut dapat diketahui bahwa keamanan dunia yang dijaga melalui Liga Bangsa-bangsa seperti yang dicita-citakan oleh Negara yang menang dalam Perang Dunia I menemui kegagalan. Kegagalan tersebut terjadi karena adanya kecenderungan ekspansi dari Negara-negara fasis seperti Jerman, Italia, dan Jepang di satu pihak dan di lain pihak keengganan Negara-negara demokrasi di Eropa dan Amerika untuk bertindak tegas terhadap kecenderungan itu.²

¹Salah satu kejadian yang membuat kekhawatiran Jepang adalah serangan tentara Jerman ke negeri Belanda pada tanggal 10 Mei 1940 dan sejak itu pemerintahan Hindia Belanda selalu waspada dan khawatir akan kemungkinan penyerbuan oleh pihak Jepang. Lihat Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1979. hlm. 18. Juga dalam Onghokam, *Rutuhnya Hindia Belanda*, Jakarta: Gramedia, 1989. hlm. 2-5.

²Negara-negara fasis adalah Negara-negara yang sangat menentang komunisme, sosialisme, liberalism, dan ingin membentuk Negara yang otoriter dan totaliter dengan melakukan kegiatan baik menyangkut aspek politik, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Sebelum Perang Dunia II Negara-negara yang menganut ideologi fasis adalah Italia pada masa Mussolini, Jerman pada masa Hitler, Spanyol pada masa Franco, dan Jepang pada masa Meiji.

Negara-negara fasis menafsirkan sikap pasif ini sebagai kemrosotan politik dan kelemahan militer pihak Negara-negara non fasis.

Kejadian-kejadian di Eropa tersebut memperkuat penyerangan pihak Jepang ke selatan. Rencana tersebut terdiri atas dua fase. Pertama, merebut daerah selatan termasuk Hindia Belanda, Filipina, Malaya, Birma, dan pulau-pulau lain di daerah pasifik sebagai daerah yang mengamankan kekuasaan Jepang. Hal ini membuat Jepang tidak tergantung dalam lapangan apapun baik secara ekonomi. Politik maupun militer. Fase kedua, adalah memperkuat daerah ini dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Melalui posisi kekuatan ini dengan benteng-benteng pulau yang didudukinya, Jepang mengharapkan dapat memaksa Amerika Serikat untuk mengadakan suatu perjanjian perdamaian.³ Disamping itu Jepang juga membuat perjanjian saling melindungi dengan Jerman pada tahun 1941. Hal tersebut memperbesar kesempatan Jepang untuk mewujudkan kemakmuran bersama Asia Timur Raya.⁴

Untuk menghindari dunia dari malapetaka. Perdana Inggris Neville Chamberlain mengadakan perundingan dengan Hitler membicarakan masalah-masalah di Eropa yang selama ini menjadi sebab-sebab konflik yaitu soal-soal persenjataan, teritorial termasuk tanah jajahan. Masalah teritorial menjadi salah satu daya dorong utama bagi napsu agresi Jerman, Italia, dan Jepang karena mereka termasuk Negara-negara yang tidak mempunyai lagi daerah jajahan yang luas seperti Inggris,

³ Onghokham. *op.cit.*, hlm. 164.

⁴ Stewart C Easton, *The Western Heritage From The Earliest to the Present*, Arizona: 1961. hlm 796.

Perancis, dan Amerika.⁵ Negara-negara fasis merasa bahwa pembagian teritorial di dunia ini tidak adil lebih-lebih karena mereka beranggapan bahwa pemilihan wilayah-wilayah yang luas perlu bagi peningkatan kemakmuran mereka sebagai Negara-negara industri yang memerlukan bahan mentah, daerah pemasaran, dan tempat investasi baru.

Perundingan Inggris dan Jerman tersebut gagal memperoleh kesepakatan yang mengakibatkan Negara-negara fasis memutuskan untuk memperluas daerah kekuasaannya. Dalam peperangan di Eropa tersebut Belanda, Belgia, dan Perancis berhasil diduduki oleh tentara Jerman pada bulan Mei 1940.⁶ Akibat sejak saat itu hubungan Hindia Belanda dan Negara Belanda menjadi terputus. Demikian juga Perancis dengan jajahan Indocina.

Meyaksikan situasi politik yang demikian, Jepang menekan pemerintahan Hindia Belanda agar diperkenankan mengimpor miyak tanah dari Hindia Belanda secara besar-besaran. Tindakan ini dimaksud agar Jepang mempunyai persediaan miyak untuk keperluan perang dalam jangka panjang. Selain itu Jepang mengirim misi perdagangan yang dipimpin oleh Kobayashi ke Hindia Belanda pada bulan September 1940 yang menuntut antara lain tentang imigran tak terbatas bagi orang-orang Jepang ke Hindia Belanda, kebebasan pelayaran antar pulau di Hindia Belanda bagi Jepang dan eksplorasi kekayaan alam di seluruh wilayah Hindia Belanda.⁷ Namun tututan tersebut dibatalkan agar Amerika dan Negara-negara sekutu tidak

⁵ Ongkhokham., *op.cit.*, hlm. 166.

⁶ AJ.Sumarmo,*Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*, Semarang: IKIP Semarang Press, tt. hlm. 10.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

menaruh curiga. Hal tersebut dilakukan karena adanya kegagalan serangan udara Jerman atas Inggris sehingga menyebabkan Jepang harus bersikap lebih hati-hati. Tindakan Jepang selanjutnya adalah membujuk Amerika agar bersikap netral apabila terjadi suatu antara Jepang dengan Hindia Belanda.⁸ Langkah ini jelas mempunyai tendensi supaya Jepang dapat berbuat leluasa di Asia yakni mengganti kedudukan Negara-negara Eropa dan Asia. Namun ternyata Amerika tidak dapat dibujuk. Setelah jalur perundingan menemui jalan buntu, maka Jepang menempuh jalan perang.

Keterlibatan Jepang turut menentukan meletusnya Perang Dunia II sedikitnya juga dipengaruhi oleh depresi ekonomi tahun 30-an yang melemahkan perekonomian banyak Negara dan menghancurkan perdagangan internasional. Ekspor Jepang yang utama ke Negara-negara yang miskin sumber alamnya tidak membantu ekonomi Jepang. Kemudian ditambah lagi dengan embargo Amerika dan Belanda atas pemuatan baja dan minyak bumi ke Jepang. Dengan kata lain Jepang harus mencari pasar dan sumber alam dengan kekerasan apabila tidak dapat dicapai dengan jalan damai. Inilah yang menjadi dasar utama untuk membangkitkan “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” yang meliputi tiga kawasan ekonomi. Pertama, kawasan dalam perang Jepang meliputi propinsi-propinsi pantai Rusia, Manchuria, Cina Utara, dan lembah sungai Yangtze di Cina. Kedua, kawasan tengah yang lebih kecil

⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

yang meliputi Siberia Timur, daerah-daerah Cina lain, dan pulau-pulau Pasifik Selatan.⁹

Menghadapi kenyataan yang demikian maka untuk mendapat daerah jajahannya Jepang harus menggunakan cara kekerasan. Oleh karena itu segera setelah mengumumkan pernyataan perang, pesawat-pesawat terbang Jepang membombardir pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour di pulau Hawaii. Serangan tersebut dilakukan pada tanggal 7 Desember 1941 yang dipimpin oleh Laksamana Yamamoto.¹⁰ Serangan tersebut sangat mengejutkan dan tidak diduga sama sekali oleh pembesar angkatan perang Amerika Serikat sebab pada waktu bersamaan di Washington sedang diadakan perundingan antara Duta Besar Jepang untuk Amerika Serikat Khochi Sobaru Nomura dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Correnel Hull. Serangan angkatan perang Jepang atas Pearl Harbour tersebut membuka tabir peperangan di Asia Timur Raya.¹¹

B. Runtuhnya Kekuasaan Hindia Belanda

Serangan atas Pearl Harbour membuat kabinet Belanda yang berada di London mengadakan konsultasi dan pada tanggal 8 Desember Gubernur Jendral Hindia Belanda Tjarda Van Stachouwer mengumumkan perang dengan Jepang.¹²

⁹ Mattulada, *Pedang dan Sampo: Suatu Analisis Kultural "Perasaan Kepribadian" Orang Jepang*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977. hlm. 176

¹⁰ AJ.Sumarmo, *loc.cit.*

¹¹ Auwjong Pengkoen dan F.J.E. Tan, *Perang Pasifik 1941-1945*, Jakarta: Keng Po, 1967. hlm. 165.

¹² *Ibid.*, hlm. 167.

Pernyataan Gubernur Jendral Hindia Belanda ini merupakan pengumuman pertama mengenai pengeboman Jepang atas Pearl Harbour yang merusak bagian besar dari 94 kapal perang Amerika Serikat dan menenggelamkan tujuh dari delapan kapal perusak besar.¹³

Jepang menggunakan taktik perang kilat atau *blitz kreiig* yang ternyata tidak dapat membendung serangan Jepang. Jendral Douglas Mac Arthur terpaksa mundur ke Australia. Selain Amerika Serikat, Inggris juga menderita kekalahan dari serangan Jepang. Benteng Inggris di Singapura dapat dikalahkan oleh Jepang sedangkan kapal Prince of Wales dan Repulse berhasil di tenggelamkan oleh Jepang.¹⁴ Akhirnya Singapura dapat direbut oleh Jepang pada tanggal 15 Februari 1942. Pasukan ini merupakan bagian kekuatan yang telah berhasil menduduki Malaya. Sedangkan bagian lain dikirim ke Sumatra guna menyelamatkan sumber minyak bumi dari politik bumi hangus Belanda.¹⁵ Kemudian serangan diarahkan ke Tarakan dan dapat direbut pada tanggal 10 Januari 1942. Selanjutnya menyusul dikuasai Minahasa, Balikpapan, dan Ambon. Bulan berikutnya yaitu Februari 1942 Pontianak, Banjarmasin, Makasar, Palembang, Bali, dan Nusa Tenggara diduduki pula. Sesudah itu pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan Jepang berhasil melakukan pendaratan di tiga tempat yaitu pantai Ayer di Banten, pelabuhan Eretan dekat Indramayu di Cirebon, dan Kranggan sebuah pelabuhan nelayan yang terletak di sebelah Timur Lasem.¹⁶

¹³ Onghokham, *op.cit.*, hlm.165.

¹⁴ AJ. Sumarmo, *op.cit.*, hlm. 15

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁶ Sagimun MD., *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*, Jakarta: Idayu Press, 1985, hlm. 73.

Dalam penderatan di Ayer ikut pula di dalamnya *Saikoo Shikikan* (Panglima Tertinggi) Letnan Jendral Imamura Hitoshi.

Di Jawa Tengah pasukan Belanda yang seharusnya menjaga kota Semarang melarikan diri ke pos-pos tentara di Bawean dan Salatiga pada hari pertama pendaratan.¹⁷ Dengan demikian Jepang mengirimkan kesatuan-kesatuan menuju daerah Jawa Tengah dan pada tanggal 7 Maret, Surakarta, dan Yogyakarta diduduki tanpa perlawanan. Dengan kekalahan tentaranya tersebut akhirnya Panglima Tertinggi Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jendral Ter Poorten memutuskan untuk menyerah kepada Jepang. Penyerahan ini atas nama seluruh Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret kepada Jendral Imanura di Kalijati.¹⁸

Berakhirnya kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda secara resmi mengawali kekuasaan pemerintah tentara Jepang. Berbeda dengan zaman penjajahan Belanda yang hanya mempunyai satu pemerintahan sipil yang berlaku di seluruh Hindia Belanda, pada masa pendudukan Jepang dikenal tiga pemerintahan militer, yaitu: (1). Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Kedua Puluh Lima) untuk Sumatera, berkedudukan di Bukit Tinggi; (2). Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Keenam Belas) untuk Jawa dan Madura, berkedudukan di Jakarta;(3).

¹⁷ Hari pertama pendartan Jepang di Jawa mendaratkan pasukan sejumlah 55.000 dengan perincian di Jawa Barat didaratkan pasukan sejumlah 30.000 pasukan, di Jawa Timur didaratkan sejumlah 20.000 pasukan dan di Jawa Tengah didaratkan pasukan sejumlah 5.000. Sedangkan pasukan Belanda tidak lebih dari 25.000 dan ditambah pasukan dari Inggris 5.500 yang sebagian besar terdiri dari pasukan udara dan ditambah 3.000 tentara Australia dan 500 tentara Amerika. Dalam Onghokham, op.cit., hlm. 212 dan 253.

¹⁸ M.C. Riklef., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, hlm. 249.

Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku, berkedudukan di Makasar.¹⁹

C. Pendudukan Jepang di Yogyakarta

Pendaratan tentara Jepang di Kranggan sebelah timur Rembang berhasil dengan baik. Dari Rembang pasukan Jepang bergerak ke wilayah Jawa Tengah dengan mengasai Semarang, Solo, Yogyakarta tanpa ada perlawanan yang berarti karena pihak Belanda kekurangan dalam bidang intelejen yaitu tidak mempunyai konsepsi apapun tentang kekuatan Jepang. Di samping itu juga kekurangan amunisi dan persiapan karena banyak tentaranya yang di tarik ke Bandung bagi konsentrasi pengamanan wanita dan anak-anak.²⁰

Tentara Belanda meninggalkan Yogyakarta dengan cara melakukan aksi bumi hangus obyek-obyek vital sebagian besar terdiri dari alat produksi dan transportasi. Penghancuran ini bertujuan untuk menghambat laju tentara Jepang agar kesulitan mendapat obyek-obyek vital tersebut. Obyek-obyek vital tersebut terdiri dari jalan, jembatan, alat komunikasi, dan lain-lain. Akibatnya pada saat pertama pendudukan Jepang di Jawa hampir seluruh kehidupan ekonomi berubah dari kehidupan ekonomi colonial ke kehidupan perang.²¹

¹⁹ Arniati Praseyawati Herkusuma, Chuuoo San'gi-In: *Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Rosda Jayaputra. 1984. hlm. 7.

²⁰ Onghokham, *op.cit.*, hlm. 254.

²¹ Sartono Kartodirdjo, ed. Al., *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975. hlm. 141.

Sejalan dengan perkembangan keamanan, pemerintah militer Jepang mengambil alih semua bidang kegiatan dan pengawasan ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi, telekomunikasi, dan lain-lain yang bersifat fisik. Beberapa peraturan yang bersifat kontrol terhadap penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang di perketat. Untuk mencegah meningkatnya harga barang dan timbulnya berbagai manipulasi dikeluarkan peraturan pengendalian harga dan hukuman berat bagi pelanggarnya.²²

Siasat bala tentara Jepang setelah masuk kota di Yogyakarta adalah menyuruh penduduk mengambil barang milik orang-orang Belanda. Maka terjadilah kekacauan yang tidak disangka-sangka. Banyak orang mengambil isi rumah orang Belanda dari rumah dan gedung-gedung yang mereka masuki.²³ Situasi yang sangat menguntungkan ini berhasil dimanfaatkan oleh Jepang dengan berpura-pura marah kepada rakyat karena terjadi perampasan tersebut. Mereka mengeluarkan peraturan yang melarang perampasan, juga diperintahkan agar semua barang rampasan itu di kembalikan dan di kumpulkan di suatu tempat yang telah ditentukan.

Peraturan ini bertujuan agar Jepang dapat cuci tangan yaitu agar kelihatan bahwa maksud kedatangan mereka benar-benar menegakan keadilan dan bukan untuk merampas harta milik rakyat. Perintah pengambilan barang rampasan itu dikumpulkan di suatu tempat yang ditentukan atau diletakkan di pinggir jalan raya. Tetapi tidak ada satupun orang Belandapun yang mengambil barang-barang

²² *Ibid.*, hlm. 143.

²³ Tashadi, et al., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1950) di daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Proyek Inventansasi dan Dokumentasi Kebudayaan DIY. 1987, hlm. 20.

dikembalikan itu karena mereka sudah masuk interniran (kamp tawanan perang).²⁴ Sedangkan pihak Jepang mulai membutuhkan rumah dan perabotannya. Dengan demikian Jepang menempati rumah-rumah kosong itu dan mengambil barang rampasan yang telah di kembalikan rakyat untuk di pakainya.

Mulai saat itu pula Jepang mengatur susunan pemerintahan Yogyakarta. Pemerintahan sipil yang sudah ada sejak zaman Belanda diteruskan oleh Jepang, hanya orang-orang dan nama instansinya diganti. Hal tersebut dilakukan agar pemerintahan berjalan lancar. Akan tetapi pemegang pimpinan adalah militer Jepang baik pusat maupun daerah.²⁵

Panglima Tentara Keenam Belas pada tanggal 7 Maret 1942 mengeluarkan Undang-Undang Nomer 1 untuk melangsungkan pemerintahan pendudukan militer yang bersifat sementara di pulau Jawa. Undang-Undang tersebut berbunyi: “Balatentra Jepang melangsungkan pemerintahan militer sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempati, agar supaya mendatangkan keamanan sentosa.”²⁶ Undang-Undang ini menjadi pokok dari peraturan tata Negara pada masa pendudukan Jepang. Undang-Undang ini dapat diketahui bahwa jabatan gubernur jenderal dihapus dan segala kekuasaannya sekarang dipegang oleh pembesar bala tentara Jepang. Susunan pemerintahan militer terdiri dari panglima tentara yang kemudian disebut *Saikoo Shikikan* sebagai pucuk pimpinan pemerintahan yang

²⁴ Setelah kekalahan tentara Belanda atas Jepang maka sebagian tentara yang tidak sempat melarikan diri menjadi tahanan pemerintah Jepang sehingga tidak dapat mengambil barang-barangnya.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁶ Kan Poo Nomer Istimewa, 2602 (1942), hlm 6-7.

dibantu empat macam departemen. Keempat departemen itu adalah Departemen Keuangan atau *Zaimubu*, Departemen Perusahaan Industri, Pertanian dan kerajinan atau *San'gyoobu*. Kemudian ditambah lagi Departemen Kehakiman atau *Shitoobu*. Kemudian pemerintahan militer di tiap propinsi membentuk pula Gunseebu dan ditetapkan dua daerah istimewa atau *koochi* yaitu Yogyakarta dan Surakarta.²⁷

Kekuatan bala tentara Jepang di Yogyakarta kurang lebih satu dasasemen yang terdiri dari 5.000 orang baik yang terdiri dari kesatuan artileri, tentara teknik maupun staf administrasi. Setelah enam bulan pemerintahan militer berlangsung, pada bulan Agustus 1942 keluar pengumuman pemerintah militer Jepang di Jakarta tentang kembalinya secara resmi pemerintahan sipil.²⁸ Pengumuman itu berupa Undang-Undang Nomer 27 dan Undang-Undang Nomer 28 tentang aturan pemerintah daerah. Berdasarkan pengumuman tersebut terbentuklah struktur pemerintahan baru menurut konsepsi Jepang, namun pada dasarnya tetap mengacu pada pola lama. Pembagian wilayah administrasi untuk bekas propinsi dihapus tetapi sisa pembagian administrasi lainnya tetap dipertahankan dengan istilah baru. Keresidena (dulu resident) menjadi *shuu*, kabupaten (dulu regentschap) menjadi *ken*, kewedanan (dulu district) menjadi *gun*, kecamatan (dulu onderdistrict) menjadi *son*, desa menjadi *ku*, sementara wilayah kota menjadi *shiku*. Sebagai kepala atau pimpinan masing-masing wilayah *shu*, *ken*, *gun*, *son*, *ku*, dan diangkat seorang *shuucookan* (dulu resident), *kenchoo* (dulu bupati/regent), *gunchoo* (dulu wedana),

²⁷ A.J. Sumarmo, *op.cit.*, hlm. 26-27

²⁸ Kan Poo, No. 1 Th. Ke 1-2602 (1942), hlm 4.

dan *sonchoo* (dulu assistent wedana).²⁹ Jepang sengaja mengangkat pimpinan-pimpinan wilayah tersebut dari kalangan orang-orang yang disegani untuk mempermudah mobilisasi tenaga rakyat.

Pemerintah Jepang member piagam yang mengandung perintah dan petunjuk untuk mengatur dan mengurus Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sultan Hamengku Buwono IX. Pemberian piagam tersebut dilakukan pada saat pelantikan Hamengku Buwono IX sebagai Sultan Yogyakarta *Koochi* pada tanggal 1 Agustus 1942 di Jakarta oleh *Gunseekan*.³⁰ Untuk mengawasi pemerintah Sultan Hamengku Buwono XI, Jepang membentuk *Koochi Jimu Kyooku* atau Kantor Urusan Daerah Istimewa yang dikepalai oleh *Koochi Jimu Kyooku Kyookan*.³¹

²⁹ Pembagian wilayah Yogyakarta *Koochi* pada akhir tahun 1942 adalah terdiri dari empat *ken*, yaitu Yogyakarta *Ken*, Bantul *Ken*, Gunung Kidul *Ken*, Kulon Progo *Ken*. Pembagian ini sebagai berikut, Yogyakarta *Ken*: 3 *gun*, 14 *son*, 14 *ku*, Bantul *Ken*: 4 *gun*, 21 *son*, 274 *ku*, Gunung Kidul: 3 *gun*, 8 *son*, 168 *ku*, Kulon Progo *Ken*: 2 *gun*, 8 *son*, 119 *ku*.

³⁰ *Kon Poo*, Tahun 1 Bulan 9-2602 (1942), hlm. 8.

³¹ Pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan pelantikan sebagai sultan yang kedua kalinya. Sedangkan pelantikan yang pertama dilakukan pada masa penjajahan Belanda pada tanggal 26 Oktober 1939. Lihat P.J. Suwarno, *op.cit.*, hlm.81.

BAB III

MOBILISASI ROMUSA DAN DAMPAK TERHADAP RAKYAT DI YOGYAKARTA

A. Usaha-Usaha Jepang untuk Keberhasilan Mobilisasi Massa

Dalam usaha menghilangkan pengaruh-pengaruh barat dan menjepangkan penduduk Yogyakarta, tentara pendudukan Jepang sangat tergantung pada propaganda. Demikiaan pentingnya propaganda ini bagi Jepang, sehingga dibentuk departemen tersendiri yaitu Sendenbu. Di Yogyakarta dalam propaganda ini di betuk Panirdya urusan propaganda pada tahun 1942.¹

Untuk mendapat dukungan dari rakyat terhadap program-program yang akan dijalankan, pemerintah pendudukan Jepang di Yogyakarta melaksanakan propaganda melalui berbagai macam media massa yaitu melalui siaran radio, surat kabar, film, organisasi-organisasi dan lain-lainnya yang semuanya berada dalam pengawasan Jepang. Propaganda ini sangat diperlukan bagi Jepang untuk menuju kesesuaian ideology antara rakyat dengan pemerintahan pendudukan Jepang tentang lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Dengan propaganda ini masyarakat akan lebih mudah dibentuk dalam pola tingkah laku dan cara berfikir Jepang. Dirumuskan propaganda merupakan satu upaya untuk mengindoktrinasi rakyat sehingga percaya dan mudah dimobilisasi. Dengan pelaksanaan propaganda melalui macam media. Jepang berharap akan mendapat dukungan dari rakyat tentang program-program yang akan dilaksanakan.

¹ Pembentukan Paniradya Urusan Propaganda ini dilaksanakan pada bulan Agustus 1945 di Yogyakarta sebagai ketuanya adalah K.R.T. Honggowongso Dalam P.J. Suwarno, *op.cit.*, hlm. 118.

Pada masa pendudukan Jepang semua partai politik dibubarkan dan partai-partai politik baru dilarang didirikan. Propaganda yang dilakukan adalah melalui organisasi-organisasi yang didirikan oleh Jepang, seperti Tiga A, Poetera, Yogyakarta Koochi Hookokai dan sebagainya. Sebagai ganti organisasi politik yang dibubarkan. Jepang meresmikan pembentukan tenaga rakyat yang disebut gerakan Tiga A pada tanggal 29 April 1942. Gerakan ini bertujuan untuk menyatukan semua organisasi sosial politik ke dalam gerakan yang kuat untuk alat propaganda menghapus pengaruh barat dan merupakan alat indoktrinasi.² Dalam gerakan Tiga A tersebut dinyatakan bahwa Jepang merupakan *cahaya asia, pelindung asia, dan pemimpin asia*. Gerakan Tiga A tidak membawa hasil menurut kehendak Jepang dan bubar pada bulan Desember 1942 setelah dijanjikan akan berdiri suatu organisasi rakyat.³ Kemudian pada bulan Maret 1943 didirikan Poesat Tenaga Kerja atau kemudian dikenal sebagai Poetera. Organisasi ini mencakup semua perkumpulan politik dan non politik Indonesia yang terdahulu yang bekedudukan di Jawa dan Madura. Organisasi ini diketahui oleh Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan Kiai H.M.Mansoer sebagai pemimpin Islam terkemuka.⁴

² "Pembentukan Gerakan Tiga A". dalam *Soeara Asia* tanggal 28-8-2602 (1942). hlm. 3.

³ Meskipun propaganda yang dilakukan Gerakan Tiga A sangat besar, tetapi sebenarnya organisasai tersebut gagal karena orang yang pilih sebagai pemimpin yaitu Mr. R. Samsuedin yang jelas bukanlah nasionalis tingkat pertama dalam arti pentingnya sebagai pemimpin nasionalis dapat dikatakan di bawah Soekarno atau Hatta. Dalam George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Surakarta: Sinar Harapan dan UNS Press, 1995. hlm. 132.

⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

Pada awal tahun 1943 keadaan perang semakin berkobar terutama semakin memburuk bagi Jepang.⁵ Hal ini menimbulkan keinsyafan bagi Jepang bahwa mereka memerlukan kerja sama dari penduduk wilayah yang diduduki untuk mewujudkan “ Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. Perubahan sikap Jepang ini dapat dilihat dari rapat Gunseikan dari semua daerah pendudukan yang dilaksanakan di Tokyo pada bulan Oktober 1942. Rapat tersebut menghasilkan keputusan tentang cara memimpin penduduk dan menyempurnakan usaha-usaha peperangan dengan mengarahkan tenaga rakyat di daerah pendudukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada perayaan pertama jatuhnya Hindia Belanda ketangan Jepang pada tanggal 9 Maret 1943 berdirilah organisasi Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) sebagai pengganti Gerakan Tiga A.⁶ “Organisasi ini bertujuan untuk membujuk rakyat dan para pemimpin serta kaum terpelajar sebagai alat untuk dapat meminta pengabdian besar dari rakyat guna usaha-usaha peperangan yang diduga akan lebih memuncak dan semakin mendekati pulau Jawa. Oleh karena itu pulau Jawa akan dijadikan sebagai sumber utama bagi tenaga buruh.”⁷

⁵ Keadaan perang pada tahun 1943 semakin tidak menguntungkan Jepang, hal ini disebabkan oleh kekalahan Jepang atas Sekutu di laut Karang dan Guadalcanal pada tanggal 7 Agustus 1942. Dalam pertempuran tersebut pasukan sekutu dipimpin oleh Jendral Mac Arthur. Serangan sekutu tidak dapat dibendung lagi oleh Jepang. Hal tersebut menyadarkan Jepang untuk mengikutsertakan rakyat di daerah jajahannya agar membantu Jepang dalam perang. Lihat O.D.P. Sihombing, *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*, Jakarta: Sinar Jaya, 1962. hlm. 100.

⁶ Pembentukan organisasi Putera sebagai pengganti Gerakan Tiga A sebenarnya telah di sahkan berdiri oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1943, sedangkan rapatnya secara besar-besaran yang dihadiri Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan K.H. Mansoer terjadi di lapangan Ikada pada tanggal 9 Maret 1943. Dalam *Asia Raya*. 9 Maret 2603 (1943). hlm. 4.

⁷ O.D.P. Sihombing, *op.cit.*, hlm.109

Di bawah perlindungan Putera dibentuk sejumlah organisasi yang sepenuhnya ditujukan untuk tujuan-tujuan perang Jepang. Pada awal dibentuk Jawa *Seenendan* yang diadakan dengan maksud supaya pemerintah pendudukan Jepang memegang kembali dalam indoktrinasi dan mempersiapkan mereka secara mental untuk tugas-tugas peperangan yang kelak memuncak di Jawa.

Setelah pembentukan Putera di Jakarta di bawah Empat Serangkai kemudian disusun pembentukan cabang-cabang di daerah-daerah termasuk Yogyakarta. Putera di Yogyakarta diketahui oleh B.P.H. Suryodiningrat. Di samping itu Jepang juga membentuk barisan wanita *Fujinkai* yang dibentuk pada bulan Agustus 1943. Organisasi ini juga digunakan untuk keperluan perang Jepang beranggotakan wanita minimal berumur 15 tahun. Pada kaum wanita ini Jepang juga member latihan kemiliteran.⁸

Mengenai romusa di Jawa pada umumnya dan di Yogyakarta pada khususnya sebagai daerah yang padat penduduknya amat baik untuk dijadikan sumber buruh kasar atau romusa.⁹ Sejak Jepang mendarat, sebagian besar dari propaganda mereka ditujukan pada tugas mengharuskan orang rela menjadi pekerja

⁸ “Pebentukan Fujinkai”, dalam *Djawa Baroe* tanggal 15 Juni 2603 (1943), hlm. 4.

⁹ Menurut perkiraan yang diperoleh pihak penguasa Jepang pada bulan November 1944 penduduk usia kerja di Jawa yang berumur 15 sampai 10 tahun 24.985.630 terdiri dari 11.588.018 laki-laki dan 12.497.815 wanita sedang yang siap untuk dimobilisasikan berjumlah 12.497.815. dalam Aiko Kurosawa, *Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa Tahun 1942-1945*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 162. Sedangkan penduduk Yogyakarta pada tahun yang sama berjumlah 1.848.814. dalam P.J. Suwarno, *op.cit*, hlm. 122.

militer Jepang. Berbagai macam jenis pekerjaan yang ada memerlukan tenaga kasar. Semakin perang menghebat semakin besar jumlah kuli yang diperlukan baik di dalam wilayah Yogyakarta maupun diluar wilayah Yogyakarta atau di luar negeri.

Gejala-gejala munculnya program romusa sebenarnya sudah dapat dilihat pada bulan Agustus 1942 pada waktu muncul apa yang disebut “Taman Barisan Pekerja”.¹⁰ Kemudian karena keadaan perang semakin mendesak bagi Jepang maka pada bulan Juli 1943 antara penguasa Angkatan Perang di Jawa yaitu Angkatan Perang ke-16 dengan penguasa Angkatan Laut di Makasar diadakan suatu perjanjian. Dalam perjanjian ini dibicarakan kondisi terperinci mengenai pemasokan tenaga kerja ke wilayah Hindia Belanda yang diduduki Angkatan Laut. Perjanjian itu antara lain berisi tentang jangka waktu pemasokan tenaga kerja, pengangkutan, upah pekerja, dan penyediaan rumah bagi romusa.¹¹

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut kemudian diadakan pertemuan yang melibatkan para pejabat yang bertanggung jawab atas tenaga kerja dari setiap wilayah pendudukan yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1943 di Singapura untuk mengkoordinasikan permintaan dan pemasokan romusa antara Jawa dan wilayah-wilayah pendudukan lainnya. Dalam pertemuan itu dilakukan upaya sedemikian rupa sehingga permintaan tenaga kerja dari Malaya, Sumatra, Borneo (Kalimantan), dan Siam harus disesuaikan sebaik-baiknya dan dikoordinasikan

¹⁰ *Asia Raya*, 11 dan 12 Agustus 2602 (1942), hlm. 145.

¹¹ Aiko Kurosawa, *op.cit.*, hlm. 125.

dengan pemasokan dari Jawa. Dengan demikian Jawa ditetapkan sebagai sumber tenaga kerja terpenting.¹²

Pelaksanaan pengerahan romusa pada akhir tahun 1943 tersebut diikuti pembentukan panitia pengerahan romusa di daerah Yogyakarta. Pembentukan panitia tersebut sesuai dengan rencana pemerintah yang berlaku bagi setiap *son*. Sebagai langkah pertama, panitia ini memulai pendaftaran orang-orang yang sanggup dan cukup syaratnya untuk melakukan kewajiban sebagai pekerja guna kepentingan pemerintah.¹³ Pelaksanaan romusa dalam hal ini perekrutan, selalu melibatkan birokrasi yang telah dibentuk Jepang di Yogyakarta.

Pengerahan romusa merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha peperangan Jepang, sehingga *soomubu* atau Departemen Urusan Dalam Negeri di Jakarta merasa perlu mendirikan suatu jawatan tersendiri yang disebut *Roomu Kyoku*. Pada waktu peperangan bertambah dahsyat dan sengit pada tahun 1943, tenaga kaum pekerja sangat di butuhkan secara besar-besaran.

Untuk medapat bantuan dari penduduk, pemeritah pendudukan Jepang membentuk organisasi rakyat yang diberi nama Putera pada tanggal 9 Maret 1943. Di Yogyakarta Putera mengadakan kampanye menjadi romusa terhadap rakyat Yogyakarta Soekarno dalam pidatonya pada rapat umum Putera di Alun-Alun Utara Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1943 mengatakan bahwa seorang pahlawan tidak

¹² *Ibid.* hlm. 125.

¹³ Mengenai struktur kepengurusan Panitia Pengerahan Romusa Yogyakarta dan beberapa jumlah pendaftar yang memenuhi syarat untuk dijadikan romusa di Yogyakarta tidak ada sumber pasti yang dapat mengungkap masalah ini. Akan tetapi mengenai pembentukan panitia pengerahan romusa dapat dilihat pada “Panitia Pengerahan Romusa Dibentoeok”, dalam Sinar Matahari, 9-3-2604 (1944), hlm.4.

harus berjuang memakai senjata tetap juga dapat dilakukan melalui sumbangan tenaga dan para romusa merupakan pahlawan dalam menunaikan kewajiban suci untuk angkatan perang Jepang.¹⁴ Keberadaan Putera hanya berkisar pada penduduk di tingkat kabupaten saja,¹⁵ padahal kenyataannya massa yang ditarik dalam usaha perang kebanyakan tinggal di pedesaan.

Dalam usah mengerahkan rakyat pedesaan, pada bulan Januari 1944 Jepang membentuk *tonari gumi* (rukun tangga) dan *aza jokai* (rapat berkala kampong) di pedesaan-pedesaan Jawa. Untuk menjamin berfungsinya badan ini Jepang memilih orang-orang yang terkemuka di desa bersangkutan untuk menjadi kepala *tonari gumi*, misalnya pemuka agama atau adat dan lain-lain.¹⁶ *Tonari gumi* merupakan jenjang terendah struktur pemerintahan yang terdiri dari 10 atau 20 rumah tangga, sedangkan di setiap kelurahan hanya dibentuk satu *aza jookai* yang terdiri dari beberapa *tonari gumi*.¹⁷ Di Yogyakarta sebagai ketua umum organisasi ini adalah Mr.R.W. Djodi dan R.P. Seto Sumarjan sebagai ketua harian dibantu empat orang pembantu dari empat kabupaten. Kedua organisasi ini berkantor di Klitren Lor Yogyakarta.

Selain dibentuk *aza jookai* dan *tonari gumi* sebagai pengganti putera di Yogyakarta dibentuk pula Yogyakarta *Koochi Hookookai* pada tanggal 8 Maret 1944. Kalau putera dipimpin seorang pangeran maka Yogyakarta *Koochi Hookookai*

¹⁴ Sinar Matahari 7 september 2603 (1943). hlm. 8.

¹⁵ P.J. Sowarno, *Hamengk Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1972-1974*, Yogyakarta: Kanisius, 1994. hlm. 108.

¹⁶ Arniati Prasedyawadi, *op.cit.*, hlm. 53-56.

¹⁷ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Gramedia Widayasarana Indonesia, 1989. hlm.195-199.

di bawah pimpinan Sultan sendiri. Tujuan didirikan *Hookookai* tersebut adalah upaya seluruh penduduk Yogyakarta memenuhi kewajiban yaitu pengorbanan diri dan berjuang untuk mencapai kemenangan akhir dalam peperangan Asia Timur Raya.¹⁸ Dibentuknya *Tonari Gumi* dan *Aza Jookai* serta Yogyakarta *Koochi Hookookai* dimaksudkan oleh Jepang untuk mobilisasi massa romusa di Yogyakarta sampai kepedesaan yaitu dengan mendaftar melalui *Tonari Gumi*.

B. Sistem Perekrutan Romusa

Jepang membuat prinsip resmi bahwa manusia harus didaftar semata-mata atas keinginan sendiri. Pada tahap awal perekrutan model ini biasa dijalankan yaitu ketika rakyat belum memperoleh gambaran yang pasti tentang apa sebenarnya romusa itu dan ketika masih ada janji upah tetap serta makanan yang dapat menarik sebagian penganggur dan mereka yang menderita kelaparan. Akan tetapi ketika nasib romusa yang menyedihkan mulai diketahui secara luas, tidak dapat lagi mengharapkan pendaftaran secara sukarela. Segala jenis seperti bujukan dan ancaman di berlakukan oleh penguasa.¹⁹

Pada konferensi yang diselenggarakan pada bulan November yang dihadiri para utusan Seksi Urusan Tenaga Kerja dalam Kerisedenan, diumumkan bahwa sebuah organisasi yang dinamakan *Roomu Kyookai* (Perhimpunan Urusan Buruh) harus dibentuk di setiap keresidenan, kesultanan, dan kota tertentu dibawah

¹⁸ *Kan Poo* No. 10, Maret 2604 (1944), Th. IV No. 37, hlm. 14.

¹⁹ O.D.P. Sihombing, *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*, Jakarta: sinar jaya, tt. hlm. 145.

pengawasan pemerintah²⁰ *Roomu Kyookai* di Yogyakarta dikenal dengan Panitia Pengerahan Romusa yang langsung di bawah pengawasan Sultan dan para bupati di daerah.²¹ Organisasi ini bersama-sama organisasi-organisasi buatan Jepang lainnya seperti Yogyakarta *Koochi Hookokai* dan *tonari gumi* bersama-sama mengurus permintaan-permintaan romusa.

Untuk permintaan pengerahan romusa terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada kepala pemerintah daerah atau bupati. Orang atau badan yang mengajukan permintaan untuk romusa hanyalah yang mempunyai perusahaan atau pabrik atau yang dianggap bermanfaat untuk kepentingan peperangan atau angkatan perang sendiri.²² Salah satu Perusahaan di Yogyakarta yang banyak memerlukan tenaga kerja adalah perusahaan mangan (*Mangan adalah logam berwarna putih keabu-abuan*) yang berada di Kliripan Kulonprogo. Diperkirakan 6.000 orang buruh dipekerjakan pada perusahaan pertambangan tersebut. Pemerintah pendudukan Jepang lebih banyak mengerahkan tenaga buruh disebabkan menginginkan hasil yang berlipat ganda, sedangkan cara eksplorasi pertambangan tersebut seluruhnya menggunakan tenaga manusia, tidak lagi menggunakan peralatan mesin seperti ketika pertambangan ini dikuasai pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu

²⁰ Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 162-163.

²¹ Daerah Istimewa Yogyakarta (*Yogyakarta Koochi*) yang dibawah kekuasaan Sultan Hamengku Buwono IX membawakan empat kabupaten (*ken*) yaitu Yogyakarta *ken* dengan Bupati K.R.T. Harjodiningrat, dan Bantul *ken* dengan Bupati K.R.T. Dirjokusumo, Gunung Kidul *ken* dengan Bupati K.R.T. Joyodiningrat, Kulonprogo *ken* dengan Bupati K.R.T. Pringgohadiningrat. Dalam *Badan-badan Negara dan Kantor-kantor Yogyakarta koochi*, Yogyakarta. 26 Desember 2602, (*Arsip Keraton Yogyakarta*)

²² Tasahadi, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, hlm. 263.

hampir seluruhnya tenaga kerja pria dewasa di sekitar Kliripan direkrut dalam eksplorasi pertambangan tersebut. Untuk menambah tenaga kerja, pemerintah pendudukan Jepang kemudian juga mengerahkan tenaga kerja wanita dan anak-anak secara paksa.²³

Ketika ada permintaan romusa dari pemerintah pusat maka panitia pengerahan romusa menetapkan kuota dan mengeluarkan perintah bagi setiap kabupaten, kemudian pada gilirannya kabupaten menetapkan kuota bagi cabang-cabang kawedanan di bawahnya. Kemudian kawedanan menetapkan tanggung jawab soal romusa kepada kecamatan dan melakukan kontak dengan kepala desa.²⁴ Kepala desa sebagai pejabat jenjang terendah akhirnya yang harus bertanggung jawab dalam pengerahan romusa tersebut. Kepala desa atau lurah menentukan siapa saja yang harus dijadikan romusa. Untuk memenuhi target permintaan romusa itu kepala desa dan tidak segan-segan melakukan pemaksaan atau penipuan. Penipuan-penipuan tersebut, misalnya rakyat diperintahkan untuk rapat di *kapanewon* tapi ternyata mereka setelah berkumpul mereka diangkut untuk dijadikan romusa. Kepala desa dalam hal ini beresempatan untuk meyingkirkan orang-orang yang tidak mereka senangi untuk dijadikan romusa. Disamping itu mereka yang suka melanggar peraturan dan yang tidak mematuhi pemimpin desa dikirim menjadi romusa.²⁵

²³ Menik Bawantari, *Eksploitasi Tenaga Kerja di Pertambangan Mangan Kliripan Kulonprogo 1912-1950*, skripsi sarjana Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1990, hlm. 58.

²⁴ O.D.P. Sihombing, *op.cit.*, hlm. 145.

²⁵ Ben Anderson, *Revolusi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988. hlm. 33.

Pengerahan calon romusa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Garis-garis Besar Tentang Pengerahan Romusa hlm. 26, yaitu mengenai syarat-syarat untuk menjadi romusa. Pada hakekatnya setiap laki-laki atau wanita usia 14-45 tahun cocok untuk menjadi romusa dengan pengecualian sebagai berikut: (a) orang-orang Jepang, (b) tentara sukarela pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho, (c) mereka yang dianggap badanya lemah dan tidak tahan bekerja, (d) mereka sedang merawat anak atau orang tua yang sedang sakit, yang dianggap berbahaya bila ditinggalkannya dan orang cacat, (e) jika dianggap berhalangan untuk kehidupan keluarga mereka, (f) mereka yang dipenjara (orang hukuman).²⁶ Calon romusa tidak perlu memenuhi syarat-syarat pendidikan tetapi harus memiliki jiwa yang sehat, stabilitas mental maupun fisik yang kuat. Pendaftaran romusa mulai dilaksanakan secara sukarela.²⁷

Sementara memasuki tahun 1944 keadaan perang semakin memburuk. Di medan-medan pertempuran Asia Timur Raya seperti Papua Nugini, kepulauan Solomon, Marshal, dan Sipan yang merupakan garis pertahanan Jepang di Pasifik dapat dikuasai Amerika Serikat.²⁸ Keadaan demikian mengakibatkan tenaga romusa bertambah banyak oleh karena itu tidak jarang terjadi pemaksaan-pemaksaan terhadap rakyat untuk dijadikan romusa. Pemaksaan tersebut dilakukan dengan melalui organisasi telah dibentuk sampai ke desa-desa bahkan terkadang diterapkan

²⁶ Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 162.

²⁷ Pelaksanaan romusa dimulai menjelang akhir tahun 1943. Oleh karena itu pendaftaran secara resmi dimulai tahun itu juga. Lihat Jonh O Sutter, *Indonesianisasi: politics in changing economy 1940-1955*, Itacha: N.Y., 1959, hlm. 187-188, dalam Ben Anderson *op.cit.*, hlm. 33.

²⁸ Arniati Prasedyawati, *op.cit.*, hlm.77.

pemaksaan²⁹, yang dikenal lebih radikal dan ekstrim seperti seleksi di jalan-jalan dan pasar, penculikan-penculikan dan penipuan.³⁰

Jepang mengeluarkan petunjuk baru serta seruan bahwa penyerahan romusa secara efektif harus dilanjutkan dengan cepat. Oleh karena itu pengerahan tidak boleh diabaikan. Dianjurkan agar menggunakan cara-cara yang tepat di dalam pertanian, misalnya agar lebih banyak digunakan tenaga hewan sehingga jumlah pekerja dapat di kurangi dan dapat dimanfaatkan sebagai tenaga romusa. Perekrutan romusa tidak hanya dikenalkan pada laki-laki saja tetapi juga dikenakan pada perempuan terutama yang berumur 16-25 tahun, perekrutan romusa perempuan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan di sekitar daerah Yogyakarta *koochi* misalnya untuk pembuatan gua persembunyian di Kaliurang atau pembuatan benteng di pantai selatan Yogyakarta.³¹

Pemberangkatan romusa ke lokasi kerja biasanya dilakukan secara berkelompok. Setelah didaftar menjadi romusa kemudian dikumpulkan di

²⁹ Salah satu kejadian tentang pemaksaan untuk dijadikan romusa di Yogyakarta terjadi sebuah sekolah lanjutan tingkat pertama, anak-anak remaja sewaktu keluar dari sekolah dikepung oleh tentara Jepang dan digiring ke stasiun dan dengan rombongan yang tak terhitung banyaknya dibawa dengan kereta api ke Jakarta. Dalam De Jong. *Pendudukan Jepang di Indonesia: suatu ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintah Hindia Belanda*, Jakarta: Kesaint Blanc, 185., hlm. 62.

³⁰ Dua orang bekas romusa dari desa Jatiayu kec. Karangmojo Gunung Kidul, Purnomo dan Martorejo mengatakan bahwa mereka direkrut menjadi romusa dengan cara ditipu oleh kepala desanya untuk menghadiri pertemuan di Wonosari (Ibu Kota Kabupaten). Dalam Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 135-136. Juga dalam hlm. 138-139 tentang pengalaman yang hampir sama yang dialami oleh dua orang bekas romusa dari Moyudan, Godean, kabupaten Bantul, Kertoredjo dan Karyodinomo, serta seorang lagi dari Triharjo kec. Pandak kab. Bantul.

³¹ Masyuri, ed. Al., *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, hlm. 262.

kapanewon atau kecamatan untuk menunggu teman-teman mereka dari desa-desa yang lain. Kemudian para romusa yang dikirim keluar Yogyakarta diberangkatkan dengan truk ke stasiun Kereta Api Gowongan (sekarang stasiun tugu) setelah mendapat pemeriksaan kesehatan dan pembagian menurut keahlian mereka oleh pemerintah Jepang. Sedangkan yang dipekerjakan di wilayah Yogyakarta berjalan kaki bersama-sama atau naik truk ke lokasi kerja. Sampai akhir pendudukan Jepang di Yogyakarta yang berhasil direkrut dalam pelaksanaan romusa di luar Yogyakarta atau ke luar negeri adalah kurang lebih sebanyak 33.000 orang. Sedangkan beberapa jumlah romusa yang berada di dalam kasultanan belum diketahui secara pasti karena setelah mengetahui bahwa Jepang kalah dalam perang mereka pulang dengan sendirinya tanpa koordinasi pemerintah.³²

Dalam perekrutan romusa pemerintah pendudukan Jepang juga memberikan hadiah kepada mereka yang berhasil dalam memenuhi kuota permintaan romusa. Di samping itu juga member sanksi kepada mereka yang gagal dalam perekrutan romusa. Di Yogyakarta pemberian hadiah tersebut dilaksanakan pada suatu upacara yang dihadiri pejabat-pejabat penting baik dari pemerintah Yogyakarta maupun dari pemerintah pendudukan Jepang. Mereka yang mendapat hadiah karena berhasil dalam pengerahan romusa antara lain wedana kabupaten Bantul, penewu Sewon Bantul, penewu Jetis Bantul, penewu Pengasih Kulonprogo, penewu Karangmojo Gunung Kidul, penewu Kasihan Bantul, penewu Nanggulan Kulonprogo.³³

³² Wara-wara, 19 September 1945, diterbitkan, Perintah Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 4.

³³ Sinar Matahari, No. 103 Th. 2603(1943), hlm.4.

C. Kondisi Kerja Romusa

Romusa tidak hanya dipekerjakan pada daerah yang berdekatan tapi juga diangkut ke manapun tuntutan tenaga kerja oleh pihak Jepang. Kondisi kerja romusa tidak dapat disamakan antara mereka yang dipekerjakan di dalam wilayah Yogyakarta dengan mereka yang dikirim keluar Yogyakarta atau ke luar negeri.³⁴ Mereka dikirim yang ke luar Yogyakarta atau ke luar negeri mengalami penderitaan-penderitaan, mulai dari system pengangkutan yang kurang memadai seperti berdesak-desakan atau kesehatan mereka yang kurang diperhatikan di lingkungan kerja.³⁵

Ada pendapat yang menganggap bahwa para romusa merupakan barang yang dapat dihabiskan dan selalu bias diganti dan sedikit sekali menaruh perhatian untuk mencegah atau mengurangi kelelahan mereka. Seolah-olah ada perhitungan bahwa akan lebih murah untuk memasok romusa baru dari pada mengambil resiko merawat atau memulihkan kembali mereka yang sakit. Dengan demikian ribuan manusia kehilangan nyawa mereka karena kurangnya perhatian yang dilakukan oleh Jepang. Bahkan sebelum sampai ketempat kerja beberapa meninggal. Hal ini terutama dialami oleh mereka yang dikirim ke luar negeri.³⁶

³⁴ Dalam pengerahan dan pengiriman romusa Jepang membagi dua yaitu *Kinroohosi* atau kerja bakti yang diselenggarakan di tingkat kabupaten kebawah dan juga permintaan langsung oleh pemerintah pusat untuk dikirim ke luar Yogyakarta dikoordinasikan oleh pemerintah militer. Sedangkan pengangkutan romusa sampai kelokasi kerja menjadi tanggung jawab *Roomu Kyookai* atau panitia pengarah romusa. Lihat Anton E Lukas, *op.cit.*, hlm. 57.

³⁵ O.D.P. Sihombing, *op.cit.*, hlm. 150.

³⁶ Salah satu gambaran romusa di Yogyakarta yang dikirim ke luar negeri adalah yang dialami oleh Sastro Dibyo seorang romusa asal Yogyakarta yang dikirim ke luar negeri untuk pembuatan jalan kereta api di Siam dan Birma. Ia menceritakan

1. Kondisi Kerja Romusa di Wilayah Yogyakarta

Romusa yang ditempatkan di wilayah Yogyakarta terutama berasal dari lingkungan masyarakat Yogyakarta. Mereka terdiri dari tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Mereka terutama dipekerjakan pada berbagai proyek-proyek militer Jepang antara lain pembuatan gua persembunyian di Kaliurang, benteng-benteng di pantai selatan Yogyakarta, juga diperlukan untuk mencari bahan baku bagi pembuatan proyek-proyek tersebut seperti pasir, batu, kayu, dan sebagainya.³⁷

Salah satu proyek militer Jepang yang banyak memerlukan tenaga romusa adalah pembuatan benteng pertahanan dari kawasan Begelan hingga Pasir Puncu Kutoarjo. Benteng yang dibuat tersebut terletak di pinggir pantai sebanyak 50 buah dengan luas area 500 hektar. Benteng tersebut bertujuan untuk memblokir tentara Sekutu dari arah selatan. Menurut Kantum (seorang yang bekerja penjenjemah bahasa antara pejabat Indonesia dengan pejabat Jepang) banyak pejabat Jepang yang datang ke tempat tersebut antara lain Panglima Tentara Jepang Jendral Imamura dan Matsumura. Kedua pejabat itu langsung datang ke lokasi pembangunan benteng sambil memberikan beberapa petunjuk.³⁸

Selain pejabat Jepang, Sultan Hamengku Buwono IX dan Ir. Soekarno juga datang ke pembangunan benteng tersebut. Selama berkunjung ke sana Sultan meminta agar pemerintah pendudukan Jepang memberi upah pada para pekerja.

bahwa dalam perjalanan di dalam kapal laut banyak orang yang merintih karena kelaparan, mabuk, dan bahkan ada yang kencing dan buang air di tempat. Di samping itu banyak orang yang mati dan di buang ke laut. Dalam *Kartini*, No.515 Oktober 1994.

³⁷ “Berkat Jasa Sri Sultan Hamengku Buwono IX Romusa Pantai Selatan Digaji Jepang”. Dalam *Kedaulatan Rakyat*, 5 September 1995, hlm. 1.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

Ternyata berkat usaha Sultan dan pendekatan yang dilakukan terhadap pemerintah pendudukan Jepang para romusa yang bekerja kemudian mendapat upah. Kepala mandor upahnya Rp. 1,00 per hari. Sedangkan para pekerja lainnya misalnya mandor mendapat 75 sen, walupun ternyata dikenakan pajak sebesar 1 sen.³⁹

Selain pembangunan benteng tersebut Sultan jga membangun Selokan Mataram yang memerlukan ribuan tenaga kerja. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi pengiriman romusa terutama ke luar negeri. Dana yang dikeluarkan oleh Sri Sultan untuk membantu para romusa di Yogyakarta juga tidak sedikit.⁴⁰

Pengerahan romusa di Yogyakarta selalu mengerahkan pria dan wanita untuk tenaga kerja pada proyek-proyek militer Jepang. Rata-rata mereka bekerja dari jam 7.00 sampai 17.00 dengan waktu istirahat jam 11.00 sampai jam 13.00, sehingga waktu kerja mereka kurang lebih delapan jam per hari. Mengenai makanan kebanyakan romusa yang berada di Yogyakarta membawa sendiri dari rumah atau membelinya jika mereka mempunyai persediaan uang saku. Menurut Ibu Harjowijoyo yang dipekerjakan sebagai pengangkut pasir, ia mendapat upah perminggu 21 sen dan selama menjadi romusa ia tidak mendapat penyiksaan dari pihak tentara Jepang.⁴¹

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan bagi romusa, pemerintah Yogyakarta *Koochi* membuka kesempatan pada rakyat Yogyakarta menyokong para

³⁹ *Ibid.*, hal.1.

⁴⁰ Jumlah dana yang dikeluarkan Sri Sultan dalam membantu romusa tidak diketahui secara pasti namun jika dikurskan sekarang diperkirakan mencapai milyaran rupiah. Lihat Atmakusumah, op.cit., hlm.206. Juga dalam Kedaulatan Rakyat, tanggal 15 septermber 1995, hlm. 1.

⁴¹ Pengakuan Ibu Harjowijoyo tanggal, 26 April 1993 di LBH Yogyakarta, dalam *Republika*, 19 Agustus 1995, hlm 2.

romusa yaitu meyakong pakaian-pakaian bekas. Usaha ini dilakukan oleh *Paniradya Ayahan Umum Kasultanan*. Hal tersebut ternyata mendapat sambutan yang baik dari masyarakat terbukti ratusan pakaian lama terkumpul. Tetapi karena kebutuhan tidak sedikit dan penderitaan rakyat pada masa itu maka kebutuhan masih tetap kurang.⁴²

Penyiksaan-penyiksaan romusa di dalam wilayah Yogyakarta lebih ringan dibanding dengan yang berada di luar Yogyakarta atau ke luar negeri karena pemerintah pendudukan Jepang ingin memberikan kesan baik bagi romusa agar mempermudah bagi Jepang untuk merekrut rakyat Yogyakarta. Selain itu juga karena Sultan Hamengku Buwono IX seringkali mengadakan kunjungan untuk melihat kondisi romusa yang dipekerjakan di Yogyakarta.

2. Kondisi Kerja Romusa yang Dikirim ke Luar Yogyakarta

Pada umumnya penderitaan yang lebih hebat dialami oleh mereka yang dikirim ke luar Yogyakarta atau ke luar negeri. Penderitaan tersebut menyangkut sistem penganakutan maupun lingkungan kerja yang tidak memadai seperti kondisi kesehatan yang jelek, makanan yang tidak memadai, dan juga penyiksaan oleh tentara Jepang. Pengangkutan romusa untuk dikirim ke luar Yogyakarta dilakukan melalui kereta api di Stasiun Gawongan (sekarang stasiun tugu). Di stasiun ini para romusa dari berbagai daerah di Yogyakarta dikumpulkan dan kemudian di berangkatkan.⁴³ Pengangkutan mereka menggunakan gerbong kereta yang penuh sesak dan kereta berjalan lambat. Kereta api tersebut berhenti di setiap stasiun untuk

⁴² *Sinar Matahari*, Th. IV No. 97 2605 (1945), hlm. 4.

⁴³ “ Di atas kapal ‘Neraka’ Menuju Singapura”, Dalam *Kartini* No.515 tgl 1-10 Agustus 1994 hlm. 29.

menambah muatan. Apabila mereka dikirim ke luar Jawa atau luar negeri kondisi pengangkutan juga tidak kalah parahnya. Biasanya sebelum dikirim mereka ditempatkan di sebuah tangsi di dekat sebuah pelabuhan untuk beberapa hari. Di sini mereka diseleksi menurut keahlian mereka. Pengangkutan dengan kapal laut juga sangat buruk. Banyak romusa yang mati karena kurangnya bahan makanan dan kondisi dalam kapal yang penuh sesak. Mereka yang meninggal langsung dilempar ke laut oleh teman-teman mereka dengan komando tentara Jepang.⁴⁴

Melihat kondisi pengangkutan demikian, banyak di antara romusa yang melarikan diri sebelum sampai di tujuan. Samingun, seorang romusa yang dikirim ke Thailand, nekat melarikan diri pada waktu kereta api berhenti di Mekri (perbatasan antara Malaya dan Thailand) untuk istirahat. Ia bersama temannya nekat melarikan diri berpacar untuk mencari selamat, ia melarikan diri ke sebuah perkampungan dan bekerja di situ sampai mendengar berita tentang kekalahan Jepang dalam perang. Sedangkan nasib teman-teman mereka yang lain tidak banyak diketahui sejak mereka melarikan diri.⁴⁵

Kondisi kerja di lokasi kerja juga sangat buruk. Seorang yang dipekerjakan untuk membuat gua persembunyian di Bandung mengatakan bahwa seringkali mendapat siksaan dari tentara Jepang karena kesalahan-kesalahan yang kecil. Makanan yang diberikan juga terlalu minim. Mereka diberi makanan sehari dua kali

⁴⁴ *Ibid*, hlm.29.

⁴⁵ “Romusa yang Lari dari Thailand”, dalam *Kedaulatan Rakyat*, 9 September 1995, hlm. 1.

dengan nasi jagung.⁴⁶ Namun demikian ada romusa yang bernasib mujur. Sebagai contoh, Ranuwidjojo, salah seorang romusa dari Gunung Kidul yang dikirim ke Padang, Sumatra Barat untuk pembangunan jalan dan lapangan terbang, menyatakan bahwa makanan tidak begitu buruk dalam pengertian mutunya dibandingkan dengan yang dialami di rumah. Ia diberi makanan nasi dicampur dengan makanan lain. Kadang-kadang juga diberi daging meskipun dalam jumlah yang terbatas. Di samping itu kalau memerlukan kelapa tinggal memetik pohon milik penduduk setempat.⁴⁷ Oleh karena itu penderitaan yang dialami oleh setiap romusa di masing-masing tempat berbeda.

Kondisi kesehatan romusa juga kurang mendapat perhatian sehingga banyak romusa yang meninggal karena terserang penyakit. Buruknya kondisi romusa digambarkan dalam kamp penampungan romusa di Thailand dan Birma. Pada waktu itu wabah malaria hitam menyebar keseluruh lokasi hunian. Mereka yang kondisi tubuhnya lemah mudah sekali tertular. Mereka yang diserang penyakit tersebut pada harinya menemui ajal pada siang hari, dan mereka terserang pada siang hari sore harinya langsung meninggal. Sepanjang 24 jam ratusan orang dikubur, sehingga

⁴⁶ Tentang kondisi makanan untuk para romusa di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Di salah satu kampung romusa di pulau Maluku selama tiga hari secara terus-menerus romusa bekerja membawa pembekalan kepantai. Sebelum meninggalkan kapal mereka diberi sedikit nasi dan baru makan lagi kurang lebih 36 jam kemudian. Makanan itu hanyalah bubur sangat cair dan rasanya seperti hangus. Untuk memperoleh makanan tersebut mereka harus berbaris selama satu jam lebih. Dalam. C.G. Thomson, *Romusa Kisah Seorang Tawanan Jepang*, Jakarta: Sinar Harapan, 198, hlm. 71.

⁴⁷ Aiko Kurasawa, *op.cit*, hlm. 136-137.

kematian merupakan pandangan yang rutin pada setiap hari.⁴⁸ Dengan demikian hal tersebut menunjukkan buruknya kondisi kesehatan. Meskipun ada klinik dengan seorang dokter Jepang tetapi ada desas-desus bahwa sekali seorang dibawa ke klinik dia tak akan kembali dalam keadaan hidup.

Buruknya kondisi kesehatan ini juga dialami oleh romusa yang ditempatkan di pulau Maluku. Para romusa terutama dipekerjakan untuk pembuatan lapangan terbang. Setelah pekerjaan dimulai selama dua minggu seluruh kamp desarang disentri. Kurang lebih 1.600 orang mati karena wabah tersebut. Bagi romusa yang sakit meskipun dibebaskan dari kerja dan diberi obat-obatan tetapi obat-obatan tersebut kurang dibandingkan mereka yang membutuhkan. Di samping serangan penyakit para romusa juga banyak yang meninggal karena kecelakaan kerja seperti pekerjaan-pekerjaan berbahaya yang menggunakan dinamit. Pakaian sangat minim, romusa menggunakan pakaian dari karung goni dan selalu terganggu oleh kutu.⁴⁹

Di tempat-tempat tertentu para romusa dipekerjakan, pasukan Sekutu seringkali mengadakan pengeboman sehingga romusa banyak yang mati.⁵⁰ Dengan demikian kondisi yang dialami oleh romusa di tiap lokasi berbeda-beda dan penderitaan yang mereka alami juga tidak sama. Hal ini sangat tergantung lokasi kerja mereka atau perlakuan tentara Jepang terhadap mereka. Di samping itu penderitaan romusa juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup sebelumnya pada mereka di rumah.

⁴⁸ “Seperti Terlepas dari Mimpi”, dalam *Kartini*. 25 Juli- 4 Agustus 1994, hlm. 26.

⁴⁹ C.G. Thomson, *op.cit*, hlm. 72-73.

⁵⁰ Aiko Kurasawa, *op.cit*, hlm. 139 dan 142.

D. Kondisi Upah Romusa

Menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh *Roomu Kyookai* pusat, romusa mendapat bayaran. Tetapi dalam kenyataan banyak romusa yang tidak mendapat bayaran. Menurut persetujuan pemasokan romusa antara Angkatan Darat ke-16 di pulau Jawa dan penguasa Angkatan Laut Jepang di Makasar pada bulan Juli 1943, diputuskan bahwa upah mula-mula romusa yang dikirim ke wilayah Angkatan Laut haruslah f.0,50 per hari dan bahwa f.3,00 haruslah dikirim kepada keluarga mereka di rumah pada tiap-tiap bulan. Bagi romusa mula-mula ditetapkan dengan gaji f.0,35 terlepas dari usia maupun tempat kerja. Upah untuk mandor yang mengepali romusa 20 sampai 30 orang ditambah f. 0,30.⁵¹

Penetapan upah tersebut terdapat dalam asas yang mengatur tentang pemberian upah romusa. Tujuan penetapan upah bagi romusa adalah untuk mencegah pindah kerjanya romusa karena pemberian upah yang tidak sama dan untuk mencegah pengembalian romusa dari badan yang lain dengan memberikan upah yang lebih tinggi, juga untuk mencegah kenaikan upah yang tidak sepatutnya.

Penetapan upah romusa oleh pemerintah pendudukan Jepang tersebut sangat diragukan pelaksanaannya. Dalam kenyataannya upah romusa berbeda-beda tergantung jenis pekerjaannya, wilayah satu dan kemampuan serta tanggung jawab perseorangan. Upah juga berbeda tergantung pada bagaimana mereka menghitungnya. Beberapa orang menyatakan pendapatan kotor sementara lainnya

⁵¹ *Kan Poo*, 10 Maret 2605 (1945), hlm. 9. Satuan mata uang yang berlaku saat itu masih *gulden (gilder)*, dilambangkan dengan “f” (florin) yang merupakan satuan mata uang Belanda yang lebih awal. F 1,00 kira-kira Rp. 6.600,00 (harga langganan *Sinar Matahari* juli 1945 satu bulan f 1,50. Sedangkan harga *Kedaulatan Rakyat* 1992 Rp. 10.000,00). Dalam Pj. Suwarno, *op.cit.*, hlm. 152.

menyatakan pendapatan bersih dikurangi biaya makanan, tabungan, dan kiriman pada keluarga yang sebelumnya telah disisihkan oleh atasan.

Upah para romusa yang dipekerjakan di Yogyakarta juga berbeda-beda upah tersebut ada yang diberikan tiap-tiap hari ada yang diberikan tiap-tiap minggu. Puji Mulyono yang bekerja sebagai pembawa kayu dan krakal digaji tiap hari f. 0,25, setelah dipindah untuk pembuatan gua persembunyian ia di bayar f. 0,24 per hari. Sedangkan Cokrorejo yang bekerja sebagai tukang batu dan kayu mendapat upah tiap hari f. 0,30. Sedangkan ibu Harjo Wiyono yang bekerja sebagai pengangkut pasir mendapat upah tiap minggunya f. 0,24.⁵² Dengan demikian kondisi upah romusa bervariasi di tiap-tiap lokasi.

Sumber informasi lain yang melengkapi antara lain kondisi pemberian upah romusa di Banten. Di sini romusa di bagi menjadi tiga jenjang dengan tiga tingkat upah yang berbeda. Kelompok pertama yang dianggap badannya kuat diberi pekerjaan yang lebih berat dan di bayar pada tingkat maksimum yaitu sebesar f. 1,00 dan 400 gram beras perhari, sementara dua kelompok lainnya yang dianggap biasa dan lemah dibayar f. 0,40 dan 250 gram beras.⁵³

Kondisi upah romusa di luar Yogyakarta atau di luar negeri rata-rata tidak jauh berbeda dengan mereka yang berada di Yogyakarta. Moeljadi, seorang romusa dari bantul yang dikirim ke Singapura sebagai pekerja dok perkapalan mengaku mendapat upah setiap hari f. 1,00 per hari dan setiap bulan disisihkan f. 5,00 untuk

⁵² Pengakuan Puji Mulyono, Cokrorejo, dan Ibu Harjowiyono tanggal 26 April 1993 di LBH Yogyakarta, dalam *republika*. 19 Agustus 1995, hlm. 2.

⁵³ Tan malaka. *Dari Pendjara ke Pendjara II*, Yogyakarta: Pustaka Murba, 1948, hlm. 155.

dikirim ke keluarganya di rumah. Tetapi kemudian di ketahui bahwa kenyataannya keluarganya hanya menerima dua kali yaitu f. 10,00 selama dua tahun dia bekerja.⁵⁴

Betapapun kecilnya upah yang dibayarkan, mereka masih lebih untung, karena beberapa romusa sama sekali tidak dibayar bahkan banyak di antaranya yang nasibnya tidak diketahui sampai sekarang. Mereka yang sama sekali tidak dibayar atau dibayar kecil, pembenaran yang dilakukan oleh atasan mereka adalah uang tersebut telah dikirim kepada keluarga mereka. Tetapi kenyataannya keluarga mereka tidak menerima apapun atau jika menerima, jumlahnya jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Anggaran tetap telah dialokasikan oleh pemerintah militer Jepang sebagai upah romusa tetapi upah tersebut tidak sampai ke tangan buruh.⁵⁵ Hal tersebut sebagian karena penggelapan dari pihak pegawai yang mempunyai kedudukan untuk mengatur romusa. Dalam kasus lain upah tersebut telah dibayarkan sebelumnya menjelang keberangkatan seseorang sebagai persiapan, tetapi diambil oleh pejabat yang bertugas dalam proses perekrutan.

⁵⁴ Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm.138-139.

⁵⁵ Anton E. Lukas, *op.cit.*, hlm. 64.

BAB IV
KEBIJAKSANAAN HAMENGKU BUWONO IX DAN PENGARUHNYA
TERHADAP MOBILISASI ROMUSA DI
YOGYAKARTA

Biografi Singkat Sultan Hamengku Buwono IX

Hamengku Buwono IX adalah putera Pangeran Haryo Puruboyo (Sultan Hamengku Buwono VIII di Yogyakarta) yang lahir pada tanggal 12 April 1912 dengan nama Gusti Raden Mas Dorojatun. Pendidikan yang ditempuh ialah *Eerste Europese Lagere School B* (Yogyakarta), *HBS* (Semarang), *HBS* (Bandung), *Gymnasium* (Harlem, Belanda), Fakultas Indologie Rijksuniversiteit sampai tingkat doctoral (Leiden, Belanda). Sebelum menyelesaikan pendidikannya G.R.M. Dorojatun di panggil pulang dan oleh Belanda dinobatkan menjadi Sultan Hamengku Buwono IX di Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 1939 setelah wafatnya Sultan Hamengku Buwono VIII. Pada zaman Jepang Sultan diangkat oleh Jepang menjadi Yogyakarta Koo pada tanggal 1 Agustus 1942.¹

A. Pengambilan Kewenangan Melalui Pergeseran Peranan Papatih Dalem

Sultan Hamengku Buwono IX secara sah menjadi sultan keraton Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 1939 menggantikan ayahnya yaitu Sultan Hameng Buwono VII.² Sebagai seorang yang mendapatkan pendidikan liberal, sejak bertahta Sultan bertekad untuk melepaskan dominasi penjajah Belanda atas keraton dan rakyatnya.

¹ Biografi singkat ini di kutip dari Atmakusumah (ed). *Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: Gramedia, 1987, hlm. 375-377.

² P.J.Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintah Yogyakarta 1942-1974*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 81.

Akan tetap menjelang penobatannya, pemerintah Hindia Belanda berusaha terus menjajah sultan dan rakyat Yogyakarta melalui *Pepatih Dalem*. Sesuai dengan Surat Perjanjian 18 Maret 1940 *Pepatih Dalem* berada di bawah kontrol Gubernur Hindia Belanda. Dengan demikian urusan pemerintahan sehari-hari kesultanan Yogyakarta berada di tangan berada di tangan Gubernur Hindia Belanda lewat *Pepatih Dalem* beserta staf dan pangreh praja yang berada di bawahnya. Selama surat perjanjian itu masih dilaksanakan. Sultan tetap tidak mempunyai wewenang yang mandiri dalam bidang pemerintah. Sultan hanya mengurus kepentingan keluarga keraton. Di dalam keraton memang ada bagian penghubung yaitu *Kawedanan kori* dan *Parehtah Luhur Karaton*, tetapi bagian itu tidak mempunyai wewenang sedikitpun untuk mencampuri urusan pemerintahan.

Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Hamengku Buwono IX tidak menginginkan Jepang langsung memerintah Yogyakarta, Sultan mengatakan kepada tentara pendudukan Jepang bahwa segala hal yang meyangkut daerah kesultanan Yogyakarta harus terlebih dahulu dibicarakan dengan sultan. Ini adalah langkah pertama agar ia sendiri dapat langsung memimpin rakyat di kerajaan. Langkah selanjutnya yang dianggap penting adalah menyingkirkan kekuasaan pemerintahan sehari-hari yang masih berada di tangan *Pepatih Dalem*. Bersama-sama Gubernur Jendral Hindia Belanda menjalankan pemerintahan di daerah kesultanan. Kepada *Pepatih Dalem* tersebut dikeluarkan perintah agar selanjutnya bertindak atas perintah sultan.³Tindakan-tindakan Sultan dalam bidang pemerintahan tersebut membuat

³ Kustiyati Moctar, "Pak Sultan Dari Masa ke Masa", dalam Atmakusumah, *Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 59.

Jepang memutuskan untuk mengukuhkannya kedudukan sebagai Sultan Yogyakarta. Pada tanggal 1 Agustus 1942 Sultan Hamengku Buwono IX dilantik oleh *Gunseekan* Mayor Jendral Okasaki menjadi Koo Yogyakarta Koochi.⁴ Sebagai *Koo* Yogyakarta *Koochi*, Sultan menjalankan birokrasi pemerintahan di bawah pengawasan Kepala Kantor Urusan Kesultanan (*Koochi Zimu Kyooku Kyookan*).⁵ Sultan Hamengku Buwono IX diberi wewenang oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mengurus pemerintah Kasultanan Yogyakarta yang mulai saat itu dinamakan *koochi* (daerah istimewa). Beberapa petunjuk dasar untuk mengurus *koochi* ini kemudian diberikan oleh kepala pemerintahan (*Gunseekan*). Ternyata perintah dan petunjuk tentara pendudukan pendudukan Jepang ini memberikan peluang bagi Sultan Hamengku Buwono IX untuk memecahkan wewenang yang semula berada di tangan *Pepatih Dalem* menjadi wewenangnya.⁶

B. Melindungi Petani

Pada masa pendudukan Jepang Sultan berusaha menjaga dan melindungi rakyat desa yang lemah dengan menginstruksikan pada pangreh praja agar mencegah petani miskin menjual tanahnya kalau tidak terpaksa sekali. Kalau sungguh-sungguh terpaksa maka kas desa diperintahkan membeli tanah itu dan memberi kelonggaran bagi penjual untuk membeli lagi di kelak kemudian hari. Dengan demikian petani

⁴ *Kan Poo* (Berita Pemerintah) No. 1 Tahun ke-1 bulan 8-2602, hlm. 21-22. *Koo*: Kepala Daerah Swatantra (otonomi), gelar yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada raja-raja di Jawa (Yogyakarta dan Surakarta). Juga dalam P.J.Suwarno, *op.cit.*, hlm. 98.

⁵ *Kan Poo* No. 1 Bulan 9-2602.,hlm.8.

⁶ Kustiyati Moehtar, *Idem.*, hlm.59-60.

tetap merdeka dan tidak dicengkeram oleh kaum pemilik uang. Instruksi tersebut tidak hanya diberikan begitu saja tetapi disertai kebijaksanaan yang membantu secara nyata. Mereka yang sungguh-sungguh miskin dan tidak mendapat bantuan dari keluarga atau badan lain, akan diberi bantuan oleh Sultan dari kas keraton. Untuk itu pengurus kampong diperintahkan mendaftarkan keluarga-keluarga miskin tersebut. Selanjutnya dengan bantuan menteri pangreh praja disampaikan kepada Sultan sehingga mereka dapat membantu.⁷ Dengan tindakan tersebut tampak bahwa Sultan berusaha melepaskan diri dari penjajahan sebab Sultan sudah mengatur penggunaan kas kesultanan yang dahulu dikontrol oleh penjajah. Dalam penggunaan tersebut rakyat kecil mendapat prioritas.

C. Memalsukan Angka Statistik Untuk Penguasa Jepang

Rakyat Jawa yang dikuasai pemerintah pendudukan Jepang dituntut untuk menyerahkan beras, ternak, bahan pakaian, perhiasan, dan tenaga manusia untuk keperluan perang.⁸ Untuk melindungi rakyatnya dari penderitaan yang lebih berat di bawah pemerintah pendudukan Jepang, pada awal tahun 1943 Sultan Hamengku Buwono IX berusaha “menyembunyikan” angka-angka statistik yang sebenarnya di daerah Yogyakarta, baik menyangkut jumlah penduduk, hasil panen padi maupun jumlah populasi ternak. Dengan menyusun angka statistik palsu Sultan berhasil

⁷ *Soera Asia*, 2 Juli 2602 (1942), hlm. 4. Juga dalam *Asia Raya*, 2 Juli 2602 (1942), hlm. 2.

⁸ Kekejaman-kekejaman tentara pendudukan tersebut antara lain dilaksanakannya wajib setor padi bagi penduduk, juga perampasan-perampasan hak milik rakyat di samping itu juga dikerahkan sebagai kelompok pendukung perang seperti PETA, Heiho, romusa, dan sebagainya. Dalam Anton E Lukas, *Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi*, Jakarta: Grafiti Press, 1988, hlm. 41-42.

menekan angka jumlah padi, ternak atau bahan makanan lain yang diminta oleh pemerintah pendudukan Jepang. Bahkan Sultan berhasil menyakinkan pemerintah pendudukan Jepang di Yogyakarta bahwa daerahnya minus, artinya tidak mampu menghasikan bahan pangan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan Jepang.⁹ Pertimbangan yang diberikan antara lain bahwa wilayah Yogyakarta terlalu sempit bila dibandingkan wilayah lain dan dalam wilayah yang sempit itu tanah yang bisa ditanami hanya sedikit karena sebagian tanah tergenang air di musim hujan dan sebaliknya daerah yang lain terlalu kering dan tidak subur sama sekali untuk pertanian.

D. Meminta Bantuan Dana Untuk Pembangunan Saluran Irigasi

Dengan alasan agar wilayahnya dapat membantu meyumbangkan hasil bumi untuk bala tentara pemerintah pendudukan Jepang seperti yang diinginkan, Sultan Hamengku Buwono IX berdiplomasi agar diberi bantuan dana dari pemerintah pendudukan Jepang untuk: (1) Membangun saluran dan pintu air untuk mengatur air hujan dari daerah tergenang ke laut terutama daerah Adikarto bagian selatan; (2) Membangun saluran Kali Progo ke daerah kering yang kekurangan air di Sleman bagian timur.¹⁰ Kedua proyek saluran ini mampu membantu wilayah Yogyakarta untuk memperbaiki produksi pertanian sehingga dapat menekan kekurangan pangan, walaupun beberapa persen hasilnya disetorkan untuk keperluan bala tentara Jepang.¹¹

⁹ Kustiyah Moehtar, *op.cit.*, hlm. 60.

¹⁰ Saluran dan pintu air yang dibangun itu yang kemudian dikenal sebagai “*Selokan Mataram*”. Dalam Kustiyati Mohtar., hlm.61.

¹¹ *Kan Poo*, 10 Desember 2603 (1943) Th.II, hlm.,40.

Rencana pembangunan kedua proyek tersebut memakan biaya f. 200.000,00. Untuk pembuatan saluran yang menghubungkan antara Bulus dengan Pakem memakan biaya f. 112.000,00.¹² Untuk perbaikan tanggul di sungai Opak di sekitar Kretek disediakan biaya f. 54.000,00. Perbaikan ini dimaksudkan untuk menghindari sawah dari amukan banjir.¹³ Di gunung Kidul juga dibangun saluran irigasi yang mampu mengairi sawah seluas 1.902 hektar dengan biaya f. 14.500,00.

E. Usaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Romusa

Untuk memperbaiki kondisi romusa dibentuk Badan Pembantu Prajurit Pekerja. Badan tersebut di tingkat nasional diketahui oleh Mohammad Hatta. Badan ini merupakan suatu badan yang dibentuk pada sidang *Chuuoo San'gi-In* keempat di Jakarta. Dalam sidang-sidangnya *Chuuoo San'gi-In* juga membicarakan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan romusa. Dalam sidang *Chuuoo San'gi-In* yang ketujuh tanggal 21-26 Februari 1945 Mohammad Hatta mengusulkan tentang usaha perbaikan nasib romusa, (a) Romusa diperlakukan dengan baik diluar dan didalam pekerjaan, (b) Romusa sedapat-dapatnya diberi makan cukup. Menurut putusan panitia makanan pada *Eiseikyoku* seorang dewasa yang beratnya 50 kilo, bekerja ringan 8 jam sehari, membutuhkan sebagai makanan yang sehat tiap hari sekurang-kurangnya makanan yang kekuatannya 2300 kalori, bagi romusa yang bekerja berat dipabrik-pabrik harus diberikan sebagai pokok makanan: beras, cantel, jagung, ubi manis. Sebagai penambahnya diberikan sayuran-sayuran, ikan kering, buah-buahan

¹² "Pemboetan Saloeran Boeloes Pakem". dalam *Asia Raya*, 8 Maret 2603 (1943) th. II, hlm.3.

¹³ "Pemboetan Tangoel Soengai Opak". dalam *Asia Raya*, 28 Oktober 2603 (1943), hlm. 4.

dan lain-lain, (c) Romusa diberi pakaian uniform spesial selama bekerja dan sedapat mungkin pada saat berangkat bekerja, (d) Kalau sudah habis perjanjian bekerja, romusnya dikembalikan ketempat mereka masing-masing dengan baik dan jangan dibiarkan mereka terlantar, (e) Romusa yang dirawat sementara waktu di asrama sebelum dikirim kedaerah tempat bekerja atau sebelum dikirim kembali pulang hendaklah diperlakukan dengan pantas, (f) Romusa yang akan dikerahkan hendaklah diperiksa lebih dahulu kesehatannya, supaya jangan nanti terambil orang yang sakit yang tidak mampu bekerja dan meninggal ditengah jalan atau ditempat bekerja. Kejadian seperti itu menjadi suatu anti propaganda yang hebat, yang tidak bisa dibatalkan dengan seribu kali propaganda.¹⁴ Usulan Mohammad Hatta tentang perbaikan nasib romusa tersebut mendapat sambutan dari pihak Jepang yaitu dengan diadakan permusyawaratan para pejabat yang menangani romusa di Surabaya. Dalam musyawarah ini dibicarakan tentang penghidupan romusa dan diputuskan untuk meningkatkan gaji mereka. Selain itu dalam musyawarah tersebut juga dibicarakan tentang pemberian tunjangan pada para romusa.¹⁵

Sebagai realisasi usul tersebut pemerintah pendudukan Jepang membentuk Pusat Badan Pembantu Prajurit Pekerja dan diketahui oleh Mohammad Hatta. Kemudian menyusul dibentuk cabang-cabang di seluruh Jawa. Badan ini mempunyai jaringan vertical yang menjangkau ke bawah dari setiapjenjang unit pemerintahan residen sampai kepala desa. Bantuan-bantuan Badan Pembantu Prajurit Pekerja di Yogyakarta yaitu dengan memberikan pertolongan kepada keluarga romusa yang

¹⁴ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 217. Juga dalam *Kan Poo* No. 62 (10 Maret 1945), hlm. 43-45 tentang “Oesoel tentang Memperbaiki Keadaan Romusa”.

¹⁵ Sinar Matahari Tahun IV No. 134 2605 (1945), hlm. 7.

terlantar. Bantuan tersebut yaitu dalam bentuk uang sebesar f. 100.000,00 yang diberikan untuk modal kerja. Mereka yang mendapat bantuan tersebut antara lain dari Piyungan yaitu sebanyak 110 orang. Di Gunung Kidul diberikan modal sebesar f. 83.000,00 kepada keluarga-keluarga romusa yang digunakan untuk mendirikan usaha.¹⁶

Menurut buku pegangan “Peratoeran Dasar dan Peratoeran Chocsocs, *Kinroo Senshi En;gokai* Fungsi badan ini adalah: (a) Membangunkan dan mengobarkan semangat, kemauan dan kegembiraan bekerja dikalangan penduduk di Jawa didalam segala lapangan.(b) Menginsafkan kaum pekerja dan keluarganya tentang Peperangan Asia Timur Raya dan menggarakan mereka untuk membantu peperangan itu dengan ikhlas dan sekuat-kuat tenaga.(c) Membantu pendaftaran calon pekerja. (d) Menjaga dan mengurus penghidupan keluarga prajurit pekerja yang sedang menjalankan kewajibannya atau tewas dan memdapat sakit diwaktu menjalankan kewajibannya.(e) Memperhatikan kedudukan pekerja.(f) Mengurus penhidupan pekerja yang mendapat kecelakaan diwaktu menjalankan kewajibannya, yang sudah sembuh tidak dapat bekerja lagi. (g) Mengadakan penghormatan untuk pekerja yang tewas dalam melakukan kewajibannya, menurut agama dan adat istiadatnya. (h) Membantu meringankan penderitaan pekerja yang sakit ketika menjalankan kewajibannya Mengadakan penghiburan bagi pekerja dan keluarganya. (Badan Pembantu Prajurit Pekerja), organisasi ini merupakan sebuah organisasi sosial yang didukung oleh sukarelawan tetapi disudsi oleh pemerintah militer serta

¹⁶ Mengenai bantuan tersebut tidak diketahui secara pasti apakah bantuan tersebut telah diberikan atau belum atau sekedar propaganda dari pihak Jepang. Lihat “Bantoean Oentuk Romusa”, dalam Sinar Matahari Th. IV 2605 (1945), hlm.4.

dijalankan atas kerja sama dengan Biro Tenaga Kerja pemerintah militer (*Roomukyoku*).

Namun tampaknya Badan Pembantu Prajurit Pekerja tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan kondisi kesejahteraan romusa tidak banyak meningkat. Hal tersebut disebabkan perhatian utama penguasa Jepang adalah peningkatan jumlah tenaga romusa yang diambil sedangkan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan romusa sangat sedikit sekali. Hal tersebut mengakibatkan himbauan yang berulang-ulang dari kaum nasionalis terus dilancarkan untuk meningkatkan kesejahteraan romusa.

F. Repatriasi Romusa

Pengeboman Heroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 merupakan akhir Perang Dunia II yang ditandai dengan penyerahan Jepang dan kemenangan bagi Sekutu. Kemudian pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaannya.¹⁷

Dengan kekalahan Jepang tersebut maka secara otomatis pengeriman romusa menjadi terhenti. Sedangkan masalah yang perlu segera ditangani adalah masalah pemulangan para romusa yang berada di luar Yogyakarta dan termasuk yang ada di luar negeri. Masalah pemulangan ini sebagian ditangani pemerintahan Jepang pada tahun 1945 dan juga ditangani pemerintah Belanda pada tahun 1946.

Untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah romusa Yogyakarta secara keseluruhan memang tidak ada data statistic secara pasti. Hal tersebut merupakan

¹⁷ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 85-86.

salah satu persoalan paling controversial dalam studi tentang pendudukan Jepang. Keterbatasan sumber tersebut disebabkan pemerintah Jepang pada waktu itu membakar sebagian arsip yang ada di Indonesia.¹⁸

Namun berdasarkan data-data yang ada sampai dengan berakhirnya pendudukan Jepang tahun 1945, romusa di Yogyakarta yang berada di luar Jawa atau di luar negeri diperkirakan sebanyak 22.000 orang, sedangkan mereka yang ditempatkan di Jawa diperkirakan 11.000 orang.¹⁹ Namun tidak diketahui secara pasti berapa romusa yang dipekerjakan di wilayah Yogyakarta sendiri. Hal tersebut terjadi karena pemulangan romusa di Yogyakarta tidak ditangani pemerintah tetapi para romusa pulang dengan kesadaran sendiri. Sedangkan berapa yang dipulangkan oleh Jepang selama pendudukannya di Indonesia tidak secara pasti.²⁰

Mengenai pemulangan para romusa pemerintah pendudukan Jepang tidak mengeluarkan keputusan konkret dalam bentuk apapun dan sangat sedikit catatan Jepang yang menyebutkan perlakuan atas romusa setelah Jepang menyerah. Seorang mantan staf Angkatan Darat ke-16 Kolonel Miyamoto menulis mengenai usahanya untuk memulangan romusa. Ia berusaha mengembalikan mereka dengan menggunakan kapal-kapal Jepang setelah pemulangan pasukan Jepang dari Jawa ke Jepang selesai. Akan tetapi melihat sulitnya membujuk pelaut Jepang untuk

¹⁸ Pembakaran arsip oleh tentara pendudukan Jepang tersebut merupakan usaha untuk menghilangkan jejak kekejaman Jepang pada generasi yang akan datang. Lihat Anton Haryono dkk., *Politik Penguasa dan Siasat Pemuda Nasionalisme dan Pendudukan Jepang di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino.1994, hlm. 76.

¹⁹ Wara-wara, 15 September 1945 diterbitkan oleh Perintah Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 4.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

memperpanjang masa kerja mereka, gagasan tersebut tidak terwujud. Kesulitan tersebut disebabkan mereka begitu khawatir akan nasib mereka sendiri sehingga jarang ada yang mempunyai kesempatan untuk menaruh perhatian atas keselamatan dan kepentingan romusa yang telah mereka mobilisasikan. Selain itu alasan Jepang tidak memberikan perhatian kepada bekas romusa disebabkan pemeliharaan status quo yang telah diperintahkan pasukan Sekutu dan hal ini dipakai alasan Jepang untuk melantarkan romusa. Ketidakpedulian tentara Jepang terhadap romusa mungkin juga dikarenakan mereka bingung dan lupa hari-hari setelah perang. Bahkan di beberapa daerah, romusa tidak diberi informasi yang tepat tentang menyerahnya Jepang dan mereka dibiarkan tanpa petunjuk.²¹

Pasukan Sekutu kemudian mengambil alih pemulangan romusa. Pasukan Sekutu yang menduduki kembali setiap bagian Asia Tenggara segera menjalankan tugasnya, mengumpulkan romusa ke kamp-kamp yang dipersiapkan untuk pemulangan tersebut. Di daerah-daerah pasukan Sekutu tiba setelah 15 Agustus 1945, dilakukan tindakan-tindakan sebagai bagian dari kewajiban yang melekat dalam mengakhiri perang. Pada kedua kasus tersebut disampaikan himbauan melalui pamphlet-pamflet dan pengeras suara yang mendorong mereka supaya muncul pada kamp-kamp penerimaan tertentu.²² Tindakan ini pada tahap pertama dilakukan oleh tentara Australia dan Inggris, tetapi pada bulan November 1945 sebuah biro Belanda yang disebut NEBUDORI atau *Hederlandsch Bureau voor Dokumentatie en*

²¹ Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 178-179.

²² Isi pengumuman pamflet tersebut adalah perintah untuk berkumpul bagi romusa di suatu tempat yang telah ditentukan. Biasanya pamflet tersebut disebarkan melalui pesawat udara agar menjangkau lokasi romusa yang terpencil. Lihat C.G. Thomso, *op.cit.*, hlm. 201-204.

Repatriering van indonesiers (Biro Belanda untuk Dokumentasi dan Repatriasi Orang-Orang Indonesia) dibentuk di Singapura di bawah pengawasan Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Hindia Belanda. Biro ini dikepalai oleh Dr. HJ. Friedericy, dengan staf bekas tawanan perang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp-kamp konsentrasi Jepang. Biro ini bertanggung jawab atas bekas romusa dan heiho.²³

G. Pengaruh Kebijakan Hamengku Buwono IX Terhadap Mobilisasi Romusa di Yogyakarta

Seperti telah diuraikan di atas Sultan Hamengku Buwono IX sebagai sultan yang mendapatkan pendidikan universitas di Leiden, Belanda. Maka, ketika dia naik tahta dan diperlakukan oleh Belanda sebagaimana pendahulunya yaitu diharuskan menandatangani menyetujui semua perjanjian yang sudah ditanda tangani pendahulunya dia menolak meskipun tidak berhasil. Namun demikian dia tetap berusaha mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan yang disusun oleh Belanda itu. Tekad Sultan untuk melepaskan Yogyakarta dari penjajah lewat perubahan birokrasi pemerintahan itu bertahan terus sampai Jepang menduduki Yogyakarta.

Pada saat pendudukan Jepang Sultan berusaha untuk punya akses langsung memimpin rakyatnya. Untuk itu kedudukan *Pepatih Dalem* yang semula tidak secara mutlak di bawah kekuasaan (karena ada di bawah kekuasaan Gubernur Jendral Hindia Belanda), ia tempatkan berada langsung ada di bawah kekuasaannya. Perubahan birokrasi pemerintahan ini membawa konsekuensi positif bagi

²³ Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm.179.

kedudukannya sebagai Sultan yang berkuasa penuh atas rakyatnya, sehingga di dapat menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dalam melindungi rakyatnya dari penderitaan selama pendudukan Jepang.

Sebagai Sultan yang berdaulat atas rakyatnya, Sultan mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat mengurangi penderitaan rakyatnya akibat pengerahan romusa. Maklumat yang dikeluarkan untuk menganjurkan pemuda-pemuda cepat-cepat menikah adalah usaha dia agar mereka tidak dikerahkan menjadi romusa. Karena seperti yang ditetapkan oleh Jepang dalam salah satu butir peraturan tentang pengerahan romusa bahwa orang yang dikerahkan menjadi romusa adalah mereka yang tidak menjadi tumpuan hidup utama di dalam sebuah keluarga.

Pembangunan proyek-proyek irigasi tentunya memerlukan tenaga kerja yang banyak. Hal ini dimaksudkan Sultan untuk mencegah rakyatnya dikirim keluar Yogyakarta sebagai romusa. Jadi kalau mereka menjadi romusa tidak dikirim jauh, di dalam wilayah Yogyakarta saja untuk mengerjakan proyek-proyek itu. Sultan juga dapat mengunjungi mereka, memperhatikan nasib mereka. Sultan meminta pada penguasa Jepang agar mereka diberi upah.

Uasha Sultan untuk memalsukan data statistik juga berdampak positif dalam melindungi rakyatnya. Dengan data statistik palsu Sultan dapat menyakinkan pemerintah pendudukan Jepang bahwa daerahnya adalah daerah minus. Ini membuat Jepang tidak meminta terlalu banyak bahan-bahan pangan maupun sandang untuk keperluan perang. Bahwa kemudian Sultan mendapatkan pinjaman dana untuk penanaman jarak, jagung dan usaha reboisasi.

Kebijaksanaan Sultan Hamengku Buwono IX seperti pembuatan irigasi, penghijauan, kesehatan, dan sebagainya tersebut pada mulanya mendapat tantangan keras baik dari pejabat-pejabat istana sendiri maupun dari rakyat Yogyakarta. Penentangan tersebut disebabkan mereka beranggapan bahwa proyek-proyek itu akan menghabiskan banyak biaya dan tenaga kerja.²⁴ Padahal kehidupan rakyat sudah menderita akibat program-program militer Jepang. Oleh karena itu program-program yang direncanakan Sultan tersebut menurut anggapan mereka justru akan menyebabkan rakyat akan lebih menderita. Akan tetapi setelah rencana Sultan tersebut terlaksana ternyata banyak membantu meringankan penderitaan rakyat Yogyakarta. Sikap Hamengku Buwono IX selama pendudukan Jepang boleh dikata agak tegang. Sultan banyak mengajukan protes atas perlakuan pemerintah pendudukan Jepang terhadap pendudukan Yogyakarta. Untuk itu ia sering diberi teguran di Jakarta yaitu pada kesempatan para raja Jawa dipanggil oleh Saikoo Shikikan. Setelah instruksi kepada semua raja selesai biasanya Sultan dipanggil sendiri dan diberi peringatan.²⁵

Pelaksanaan program-program yang telah ditentukan Sultan tersebut adalah usaha pihak keraton untuk meringankan beban rakyat yang harus memenuhi tuntutan Jepang akan bahan mentah dan tenaga kerja untuk meneruskan program melawan Sekutu. Pelaksanaan proyek-proyek lain tentu memerlukan banyak tenaga dan inilah yang dipakai alasan oleh Sultan untuk menolak perintah pengiriman penduduk untuk

²⁴ Salah satu proyek irigasi yang memerlukan banyak tenaga kerja adalah proyek irigasi sungai Progo yaitu sebesar 16.000 orang, sedangkan berapa tenaga untuk proyek-proyek lain tidak diketahui secara pasti namun diperkirakan lebih dari itu. Lihat *Sinar Matahari*, 27 Maret 2603 (1943), hlm. 4.

²⁵ P.J.Suwarno, *op.cit.*, hlm. 140.

menjadi romusa ke luar Yogyakarta. Walaupun belum bisa melepaskan diri dari program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah pendudukan Jepang, kebijaksanaan Sultan tersebut telah mengurangi penderitaan rakyat Yogyakarta dari mobilisasi massa terutama untuk romusa.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan Sultan Hamengku Buwono IX ini bertujuan untuk mencegah rakyat Yogyakarta agar tidak banyak yang dikirim menjadi romusa ke luar wilayah Yogyakarta. Kalaupun dikerahkan menjadi romusa, Sultan dengan kebijaksanaannya berusaha untuk melindungi rakyatnya yang menjadi romusa di dalam wilayah Yogyakarta. Dengan demikian Sultan sebagai penguasa di keratonnya menjalankan fungsi kekuasaannya untuk melindungi rakyatnya.

H. Dampak Pengerahan Romusa Terhadap Rakyat Yogyakarta

Pengerahan romusa membawa dampak yang besar bagi rakyat Jawa dan juga masyarakat Yogyakarta. Perekrutan romusa yang semula berdasarkan sukarela kemudah berubah menjadi sebuah bentuk eksploitasi tenaga kerjo oleh tentara pendudukan Jepang.

Dampak pengerahan romusa di Yogyakarta yang pertama, adalah berkurangnya tenaga kerja dalam bidang pertanian di pedesaan karena banyak rakyat desa yang dikerahkan sebagai romusa dan banyak juga yang melarikan diri ke kota-kota karena takut terhadap program tersebut. Tindakan Jepang yang lebih jauh lagi adalah pengambilan wanita sebagai romusa.²⁶

²⁶ Sartono Kartodirjo dan Marwati Djoned Pospoenegoro, *op.cit.*, hlm.33-34.

Bagi masyarakat pertanian mobilisasi intensif pada suatu saat akan membawa dampak yang serius. Jika saat perekrutan jatuh pada musim tanam, penanaman bisa terbengkalai. Jenis pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja laki-laki seperti membajak dan mengontrol pengairan, sering sepenuhnya terabaikan dan akibatnya produksi menurun. Yogyakarta sebagai daerah yang mempunyai produksi padi padi terendah nomor dua di Jawa setelah Madura, yaitu pada tahun 1940 produksi beras Yogyakarta sebesar 219.300 ton dari jumlah penduduk 1.551.710 sehingga produksi per kapita adalah 141 kilogram. Produksi tersebut terus menerus berkurang selama masa pendudukan Jepang karena kurangnya tenaga kerja akibat mobilisasi besar-besaran dalam berbagai jenis latihan organisasi massa dan kerja romusa.²⁷

Di samping itu rakyat di pedesaan dituntut untuk menyelesaikan sistem produksi mereka setelah impor dari Negara-negara Sekutu dihentikan. Mereka diwajibkan menanam kapas, jarak, tebu, dan lain-lain. Tindakan Jepang dalam pertanian tersebut mengakibatkan petani menjadi merosot, dan kemudian menyebabkan kekurangan gizi dan kemunduran stamina. Hal ini merupakan tindakan yang berlawanan dengan gagasan untuk “melipatgandakan hasil”.²⁸

Beban penderitaan rakyat masih ditambah lagi dengan berkurangnya bahan makanan, pakaian, dan barang lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan rakyat dari segala kalangan dan terutama kalangan rakyat jelata di desa-desa yang merasakan dampak langsung kekejaman tentara tentara pendudukan Jepang. Ketidakpuasan ini berangsur-angsur berkembang menjadi perasaan terhadap

²⁷ Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 5-6.

²⁸ Sartono Kartodirjo dan Marwati Djoned Pospoenegoro, *loc.cit.*

pemerintah pendudukan Jepang. Sering dengan merosotnya keadaan ekonomi, akhirnya menjadi suatu kebencian terhadap tentara pendudukan Jepang.²⁹

Akibat kedua, dalam bidang politik setiap golongan pegawai negeri di Yogyakarta dipaksa Jepang untuk menjalankan beberapa tanggung jawab pengerahan di tingkat desa, melakukan propaganda. Kepala desa dan camat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengerahan romusa di daerahnya sering memperburuk keadaan yaitu dengan pemaksaan-pemaksaan atau menunjuk orang-orang yang tidak mereka senangi menjadi romusa.³⁰ Dengan demikian dilibatkannya kaum politisi, pejabat-pejabat pemerintah dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah merupakan kemrosotan kewibawaan dan harga diri golongan ini di mata rakyat.

Golongan masyarakat kaya atau pedagang Cina, para anak pejabat terbebas dari mobilisasi romusa dengan cara membayar pejabat maupun membayar orang lain untuk menggantikannya menjadi romusa. Ketika Jepang menerima pemuda-pemuda Tionghoa di Yogyakarta dalam berbagai tugas maka hanya anak laki-laki dari keluarga miskinlah yang diambil. Orang-orang kaya membayar dokter-dokter untuk memberikan surat keterangan bahwa anak mereka menderita lemah jantung. Di dalam masyarakat Tionghoa orang-orang yang ditugaskan menerima pendataan atau pendaftaran pemuda-pemuda itu menggunakan kekuasaan mereka secara luas untuk korupsi dan pemerasan.³¹

Ketika, akibat kebijakan Jepang baik dalam bidang pertanian, pemerintahan dan sebagainya mengakibatkan memburuknya kesejahteraan sosial. Di Yogyakarta

²⁹ Selo Sumarjan. *Pendudukan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press. 1981, hlm. 15.

³⁰ Ben Anderson, *op.cit.*, hlm.33-34.

³¹ Bend'cx Adeason, *op.cit.*, hlm. 33.

pada tahun 1944 angka kematian melebihi kelahiran. Angka kelahiran 49 orang per seribu penduduk, sedangkan angka kematian 53 per seribu penduduk. Penurunan angka kelahiran ini disebabkan pada waktu pendudukan Jepang rakyat sulit memiliki tenaga dan keinginan dalam memenuhi fungsi reproduksi karena kelaparan dan kesulitan-kesulitan hidup keseharian.³²

³² Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 105-107.

BAB V KESIMPULAN

Kekalahan Belanda melawan Jepang mengakibatkan Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Pada awal pendudukannya, Jepang memprogandakan apa yang disebut sebagai “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. Namun propaganda tersebut hanyalah siasat untuk mengelabui rakyat agar membantu Jepang dalam peperangan melawan Sekutu. Di samping itu ekspansi Jepang ke wilayah selatan bertujuan mencari daerah yang potensial untuk mencukupi kebutuhan perang yaitu sebagai sumber tenaga kerja, bahan baku, dan tempat pemasaran bagi industry Jepang.

Pendudukan Jepang di Yogyakarta sebenarnya tidak lepas dari tujuan tersebut. Rakyat dimobilisasikan terutama dari golongan muda, dilatih dan dipekerjakan untuk membantu Jepang dalam memenangkan perang. Di samping itu Jepang juga mengerahkan romusa sebagai barisan pekerja yang dipekerjakan terutama di belakang garis pertempuran.

Mobilisasi romusa ini berkaitan erat dengan terdesaknya Jepang, dari pihak yang menyerang menjadi pihak yang diserang pada tahun 1943. Dalam usaha pertahanan tersebut Jepang membangun infrastruktur perang seperti lapangan terbang, benteng-benteng pertahanan, parit atau gua perlindungan, pangkalan minyak, atau sarana lain untuk keperluan perang. Untuk pembangunan sarana-sarana perang tersebut Jepang membutuhkan banyak tenaga romusa.

Pada mulanya rakyat Yogyakarta dengan sukarela untuk menjadi romusa. Akan tetapi setelah rakyat mengetahui perlakuan buruk tentara Jepang melalui

mereka yang pulang dari romusa dan banyaknya romusa yang mati di tempat kerja, pemerintah pendudukan Jepang mulai sulit untuk memobilisasikan rakyat. Maka pemaksaan-pemaksaan dan intimidasi seringkali dilakukan. Untuk mengurangi ketakutan rakyat untuk menjadi romusa, maka Jepang melancarkan propaganda yang menganggap romusa sebagai pahlawan. Akan tetapi itu hanyalah sekedar propaganda, nasib romusa di tempat kerja semakin buruk. Makanan yang minim, kerja kasar yang sangat keras, pertolongan yang seadanya, perlakuan kasar tentara Jepang, dan penyakit merupakan penderitaan yang dialami romusa di tempat kerja. Keadaan ini juga menyebabkan banyak romusa yang mati.

Untuk mencegah rakyatnya dikirim ke luar wilayah Yogyakarta atau keluar negeri sebagai romusa, Sultan Hamengku Buwono IX mengusulkan kepada Jepang untuk memberikan dana bantuan pembangunan saluran air. Sultan menyakinkan Jepang bahwa di Yogyakarta kondisi beberapa daerahnya sangat kering di musim kemarau yang menyebabkan menurunnya produksi pangan, tetapi pada musim hujan banyak daerah yang tergenang air dan merusak lahan pertanian. Usul Sultan tersebut disetujui oleh Jepang, sehingga banyak rakyat Yogyakarta yang bekerja pada proyek-proyek yang tersebut dan tidak menjadi romusa yang dikirim untuk daerah lain atau luar negeri.

Meskipun demikian banyak juga rakyat Yogyakarta yang dikirim sebagai romusa ke luar Yogyakarta atau luar negeri. Sehingga mobilisasi romusa membawa dampak yang serius bagi rakyat terutama di pedesaan, seperti kekurangan tenaga kerja dalam bidang pertanian yang mengakibatkan menurunnya produksi pangan,

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Artikel

Anderson, Ben, (1998). *Revolusi Pemoeda*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Arniati Praseyawati Herkusuma, (1984). *Chuuoo San'gi-In: Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Rosda Jayaputra.

Atmakusumah, ed., (1982). *Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: Gramedia.

Auwjong Pengkoen dan F.J.E. Tan, (1967). *Perang Pasifik 1941-1945*, Jakarta: Keng Po.

AJ. Sumarmo, (1988) *Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*, Semarang: IKIP Semarang Press.

Aziz, M.A., (1955). *Japan's Colonialisme and Indonesia*, The Hague: Martinus Nijhoff.

De Jong, (1985). *Pendudukan Jepang di Indonesia Indonesia: Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintah Hindia Belanda*, Jakarta: Kesaint Blanck.

Diponingrat, (1956). *Kota Yogyakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956*, Yogyakarta: Sub Panitia Penerbitan.

Easton, Stewart C., (1961). *The Western Hertage from Earliest to the Present*, Arizona.

Ensiklopedi Indonesia,(1986). Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

G. Moedjanto, (1991). *Sejarah Indonesia Abad ke-20 Jilid I dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*, Yogyakarta: Kanisius.

Gottschalk, Louis,(1950). *Mengerti sejarah* (terjemahan: Nugroho Notosusanto), Jakarta: Universitas Indonesia.

- Kahin, Mc, Turnan, (1995). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesi*, Surakarta: Pustaka Sinar Harapan dan UNS Press.
- Hardi, (1979). *Api Nasionalisme*. Jakarta, Gunung Agung, 1979.
- Kurasawa Aiko, (1989). *Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Gramedia Widayarsana Indonesia.
- Lukas, Anton E.,(1989). *Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi*, Jakarta: Grafiti Press.
- Mariam Budiharja, (1984). *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: sinar Harapan.
- Masyuri, ed. Al.,(1977). *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muttulad, (1977). *Pedang dan Sampo: Suatu Analisa Kultural “Perasaan dan Kepribadian”Orang Jepang*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurhadi Soedarno, (1982). *PUTERA (Puasat Tenaga Rakyat)*, Jakarta Tinta Mas.
- O.D.P. Sihombing,(1979). *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*, Jakarta: sinar jaya,tt.
- Onghokham, (1982). *Runtuhnya Hindia Belanda*, Jakarta: Gramedia.
- P.J. Sowarno, (1994). *Hamengk Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1972-1974*, Yogyakarta: Kanisius.
- Rifleks, MC., (1993). *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Roeslan Abdoelgani, (1981). “*Melacak Jejak Revolusi Nosional*”, Prisma.
- Sagimun MD., (1982). *Perlwanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*, Jakarta: Idayu Press.

Sartono Kartodirdjo,(1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Sartono Kartodirdjo dan Marwati Djonet, (1972). *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka.

Selo Soemardjan, (1991). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soegianto Padmo, (1994). *Politik Penguasa dan Siasat Pemoeda Nasionalisme dan Pendudukan Jepang di Indonesia*, Yogyakarta: kanisius dan Lembaga Realino.

Sutter, Johm Orval, (1959). *Indonesianisasi: Politic in a Changing Economy 1940-1955*, Itacha: Cornell University.

Thomson, C. G., (1980). *Romusa Kisah Seorang Tawanan Jepang*, Jakarta: Sinar Harapan.

2. Surat Kabar dan Majalah

Asia Raya:

6 September 1943, "Nasehat Soeltan Oentoek Pemoeda".

10 Oktober 1943, "Pemboeatan Saloeran Boeloes Pakem".

Djawa Baroe:

15 Juni, "Pembentoean Fujinkai".

1 Maret, "Pembentoean Hookookai".

23 Agustus, " Pembentoean Gerakan Tiga A".

Kan Poo:

10 Januari 2602 (1942), Th. I No.1.

9 September 2603 (1943), Th II No.26.

10 Desember 2603 (1943), Th. II No.31.

10 Maret 2604 (1944), Th. III No.37.

10 Agustus 2604 (1944), Th. III No.43.

Kartini: No. 515 Tgl. 1-10 Agustus 1994:

"Di Atas Kapal 'Neraka' Menuju Singapura"

“Pengakuan Seorang Mantan Romusa”
 “Seperti Terlepas dari Mimpi”

Kedaulatan Rakyat:

5 September 1995, “Berkat Jasa Sri Sultan Hamengku Buwono IX Romusa di
 Pantai Selatan Digaji Jepang”
 9 September 1995, “Romusa yang Lari dari Thailand

Sinar Matahari:

Th. IV No. 185 1945, “Hiburan Oentoek Romoesa dan Pemoeda”.
 Th. IV No. 103 1945, “Hadiah Pengerahan Romoesa”.
 Th. IV No. 124 1945, “Nasib Romoesa Diperhatikan Para Pembesar”.
 19 Maret 1943, “Panitia Pengerahan Romoesa Dibentoeck”.
 No. 165 Th. IV 1945, “Peroesahaan Oentoek Keloerga Romoesa”.
 28 Maret 1945, “Propagandis Tonarigumi Mendapat Gemblengan”.
 7 September 1945, “Bantoen Oentoek Poetra”.

Soeara Asia:

31 Juli 1943, “Bantoen Oentoek Kesehatan”.

Wara-wara:

19 september 1943, “Pembentoeckan Panitia Pendjepeotan Romoesa”.

3. Skripsi

Menik Bawantari, Skripsi (1990), Eksploitasi Tenaga Kerja di
 Pertambangan Mangan Kliripan (Kulon Progo) 1912-1950, yang ditulis oleh,
 Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra UGM.

kekurangan gizi dan wabah penyakit merajarela di mana-mana seperti penyakit beri-beri, disentri, busung lapar, dan sebagainya.